

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 200-2040

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020-2040

I. VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Visi Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2040.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera” serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dengan memperhatikan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional dan visi misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka visi pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 adalah “Mewujudkan Industri Nusa Tenggara Barat yang Tangguh (Gemilang), Berdaya Saing Global, Sejahtera dan Berkeadilan”.

B. Misi Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2040.

Berdasarkan rumusan visi pembangunan industri tersebut, maka misi yang akan dicapai dalam pembangunan industri di Provinsi NTB tahun 2020-2040 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri sebagai salah satu pilar pembangunan daerah dan penggerak perekonomian daerah sehingga dapat menopang terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
2. Memperkuat struktur industri sehingga memiliki kekuatan internal, keunggulan eksternal, sistem yang sehat sehingga berkemampuan menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat;
3. Meningkatkan daya saing industri di tingkat regional, nasional maupun global melalui kemampuan berinovasi berbasis pengembangan IPTEK.

C. Strategi Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2040

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
5. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
6. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
7. Melakukan pembangunan industri hijau;
8. Melakukan pembangunan industri strategis;
9. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
10. Meningkatkan kerjasama nasional bidang industri.

II. SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2040

Adapun sasaran Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2040 sehingga kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 11.05% (sebelas koma nol lima persen);
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

Adapun sebagai acuan untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB periode 2020-2040 secara kuantitatif, sasaran pembangunan industri dapat dilihat dari 5 (lima) indikator, yaitu: pertumbuhan sektor industri, kontribusi

industri terhadap PDRB Non-Tambang, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi sektor industri.

Tabel 2.1 Target Sasaran Pembangunan Industri
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Sasaran	2018	2024	2029	2035	2040
1	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	3.96	4.79	5.27	5.79	5.98
2	Kontribusi Industri terhadap PDRB Non-Tambang (%)	4.12	8.13	9.10	10.12	11.05
3	Nilai Ekspor Sektor Industri (USD Juta)	92.74	98.63	101.26	103.45	105.14
4	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (org)	1.448	1.985	2.376	2.618	3.098
5	Nilai Investasi Sektor Industri (Juta Rupiah)	48.265	65.342	71.909	74.781	80.279

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait dan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan industri.

B. Penahapan Capaian Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040

Dalam upaya percepatan tercapainya sasaran pembangunan Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat maka penahapan

capaian pembangunan. Penahapan capaian pembangunan industri prioritas daerah terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama (2020-2024)
Pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2. Tahap Kedua (2025-2029)
Pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif (berdaya saing) dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. Tahap Ketiga (2030-2040)
Pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah Industri Mandiri dan Sejahtera yang bercirikan struktur industri daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat regional, nasional, maupun global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

III. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

A. Karakteristik Industri NTB Tahun 2040

Industri NTB tahun 2040 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri manufaktur kelas dunia (*world class manufacturing*), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
 - a. Tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya daerah.
 - b. Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
 - c. Terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.
2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya.
 - b. Memiliki kandungan lokal yang tinggi.
 - c. Menguasai pasar domestik.
 - d. Memiliki produk unggulan industri masa depan.
 - e. Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - f. Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
3. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*).
4. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi daerah sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan

kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

B. Strategi Pembangunan Industri

Strategi Pembangunan Industri melibatkan berbagai *stakeholders* antara lain Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta/investor, dan pelaku industri sendiri. Program pembangunan Industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Prioritas Provinsi dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan industri Provinsi NTB selama 20 tahun ke depan mengacu pada 3 (tiga) strategi dan dilengkapi dengan arah kebijakan masing-masing strategi, yaitu:

Tabel 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat (2020-2040)

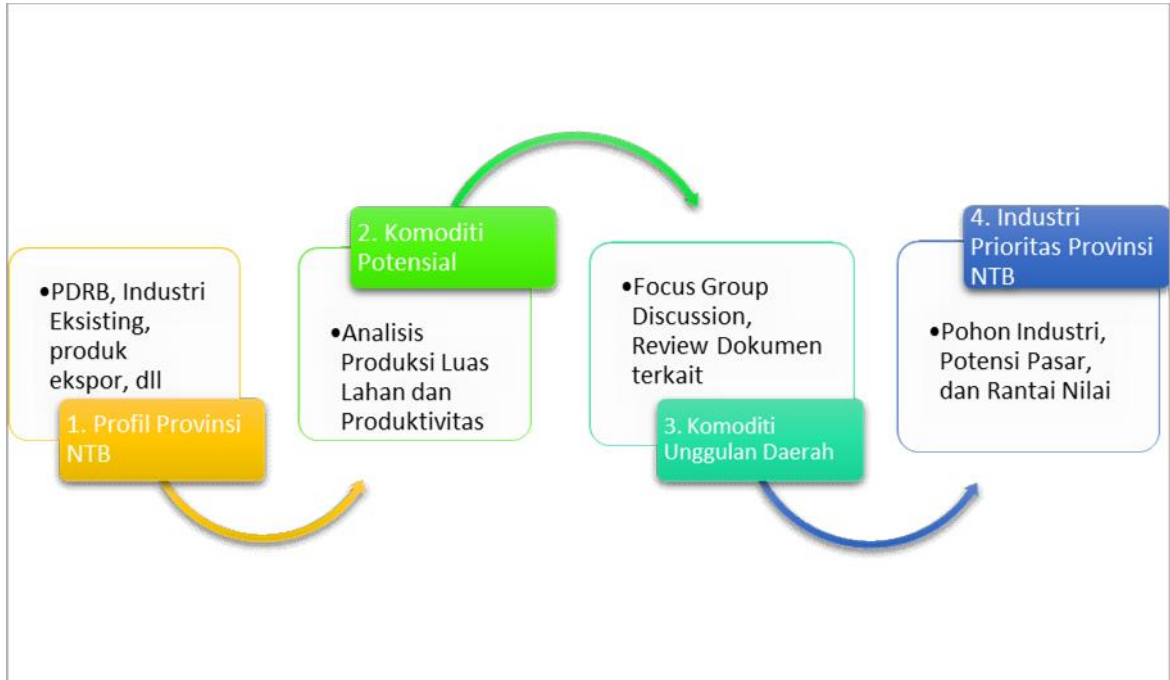
Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberdayaan industri berupa kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas; • Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; • Meningkatkan <i>value added</i> produk industri primer baik melalui peningkatan produktivitas maupun inovasi produk; • Mengembangkan industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam; • Membangun informasi industri yang terintegrasi antara Industri Kecil dan Menengah dengan Industri Besar terkait transfer teknologi dan ilmu pengetahuan; • Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja; • Menerapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri baru dan eksisting.
<p>2. Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga akademis, dan asosiasi); • Meningkatkan akselerasi tumbuhnya industri kecil dan menengah; • Memberikan fasilitasi serta insentif baik fiskal dan non fiskal untuk pengembangan Industri Prioritas; • Penguatan pola dan struktur pengembangan

Strategi	Arah Kebijakan
	<p>perwilayahan industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri, berupa 1) Kawasan Peruntukan Industri; 2) Kawasan Industri, dan 3) Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitasi jaringan energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, sanitasi, transportasi, informasi industri; • Memperluas akses permodalan dan kerjasama pembiayaan.
<p>3. Peningkatan keunggulan kompetitif (daya saing) dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas melalui: optimalisasi kapasitas usaha secara ke ekonomian lingkup industri dalam jangka pendek dan perubahan teknologi dalam jangka panjang dalam penggunaan peralatan industri; • Peningkatan penguasaan teknologi melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan transfer of technology perbaikan manajemen usaha; • Fasilitasi dan insentif dalam perubahan teknologi dan perbaikan manajemen usaha dalam rangka peningkatan produktivitas; • Meningkatkan kerjasama dalam berbagai skala baik nasional, regional dan internasional pada bidang pengembangan industri.

C. Penetapan Industri Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada beberapa fase analisa yang dilakukan untuk menentukan Industri Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain: (1) melihat bagaimana profil daerah yang di dalamnya dianalisa perkembangan PDRB, kondisi Industri yang masih berjalan, produk ekspor dari sektor industri, potensi pemanfaatan lahan; (2) kemudian baru dilakukan analisa sub-sektor dan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah serta untuk menentukan komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan ke arah industri; (3) dari komoditi unggulan tersebut akan masuk sebagai komoditi potensial. Selanjutnya dalam RPIP ini, akan dikelompokkan ke dalam komoditi unggulan berdasarkan kriteria yang ada (analisa trend produktivitas, potensi lahan pengembangan serta potensi pasar ke depannya), sehingga pada akhirnya (4) penetapan Industri Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara umum penentuan Industri Prioritas digambarkan dalam diagram berikut ini.

Gambar 3.1. Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Prioritas Provinsi



(Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019)

Melalui analisa yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan, yaitu:

1. Kriteria Keunggulan Komoditi; hal ini mencakup jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia, kontinuitas pasokan bahan baku yang berkualitas, aspek jaringan pemasaran, ketersediaan lahan pengembangan, akses pembiayaan dan dukungan kelembagaan pemerintah dan memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global.
2. Kriteria Kebermanfaatan; kriteria ini mencakup unsur nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan tenaga kerja produktif, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
3. Kriteria Dukungan Stakeholders; mencakup penguasaan teknologi dan inovasi, dukungan dan kesiapan masyarakat, dukungan perguruan tinggi, pihak perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sektor lainnya yang terkait.

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan Industri Prioritas provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Daftar Industri Prioritas Nasional (2015-2035)

No	Industri Prioritas	Jenis Industri
1	Industri Pangan	<ul style="list-style-type: none">• Industri Pengolahan Ikan• Industri Pengolahan Susu• Bahan Penyegar (Kopi, Suplemen Berbasis Teh,

No	Industri Prioritas	Jenis Industri
		Madu, dsb) <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Minyak Nabati • Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran • Industri Tepung • Industri Gula berbasis Tebu, Aren dan Kelapa • Industri Makanan dan Minuman
2	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Jamu • Industri Garam • Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Tekstil dan Produk Tekstil • Industri Kulit dan Alas Kaki • Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu dan Rotan • Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Komponen Otomotif • Industri Perkeretaapian • Industri Perkapalan • Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Elektronika • Industri Komputer • Industri Peralatan Komunikasi
6	Pembangkit Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Kelistrikan
7	Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin dan Peralatan • Industri Komponen • Industri Bahan Penolong • Industri Jasa
8	Industri Hulu Agro	<ul style="list-style-type: none"> • Oleofood Oleokimia (Minyak Atsiri) • Kemurgi • Industri Pakan • Industri Barang dari Kayu • Industri Pulp dan Kertas
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar • Industri Pengolahan Logam Logam Mulia, Tanah Jarang dan Bahan Bakar Nuklir • Bahan Galian non Logam (industri keramik) • Semen
10	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> • Petrokimia Hulu • Kimia Organik • Industri Pupuk • Resin Sintetis dan Bahan Plastik • Karet Alam dan Sintetik • Industri Bahan Kimia Lainnya

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (*road map*) Pengembangan Industri Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Industri Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2040

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Jenis Komoditi/Produk	Lokasi
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut Lainnya	Industri Olahan Ikan	Kab. Dompu Kab. Bima Kab. Lotim
			Industri Olahan Rumput Laut.	Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Barat
			Industri Garam Konsumsi	Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Barat Kab. Sumbawa Kab. Bima
		Industri Berbasis Ternak Ruminansia	Sapi	Kab. Sumbawa Kab. Bima Kota Bima Kota Mataram
			Kambing	Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Barat
		Industri Berbasis Ternak Unggas	Industri Berbasis Ternak Unggas	Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur
		Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan	Kopi	Se-NTB
			Kelapa	Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Utara Kab. Lombok Timur
			Gula Aren	Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah
			Mente	Kab. Sumbawa Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Utara
			Jagung	Kab. Sumbawa Kab. Lombok Utara Kab. Bima Kab. Dompu
			Coklat/Kakau	Kab. Lombok Utara Kab. Lombok Timur
			Olahan Buah dan Sayur	Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Utara

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Jenis Komoditi/Produk	Lokasi	
				Kota Mataram Kab. Bima	
				Porang	Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa
				Bawang	Kab. Sumbawa Kab. Bima Kab. Lombok Timur
2	Industri Hulu Agro	Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Industri Barang dari Kayu	Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Utara Kab. Lombok Barat Kab. Mataram	
		Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Industri Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Bima	
		Industri Pakan	Industri Pakan Ternak	Kab. Lombok Barat Kab. Bima Kab. Dompu	
		Industri Pupuk Organik	Industri Pupuk Organik	Se-NTB	
3	Industri Permesinan, Alat Transportasi dan Energi Terbarukan.	Industri Permesinan	Industri Permesinan	Se-NTB	
		Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Listrik dan Alat Transportasi Lainnya.	Kota Mataram Kab. Lombok Barat Kab. Bima Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Bima	
		Industri Energi Baru Terbarukan	Industri Energi Baru Terbarukan	Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Barat Kab. Sumbawa Kab. Bima Kab. Lombok Utara	
4	Industri Pertambangan	Industri Smelter dan Turunannya	Industri Turunan Smelter	Kab. Sumbawa Barat	
5	Industri Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Kimia	Industri Kimia	Kab. Lombok Barat Kota Mataram Kab. Lombok Tengah	
		Industri Farmasi Herbal	Industri Farmasi Herbal	Se-NTB	
		Industri Kosmetik Herbal	Industri Kosmetik Herbal	Kota Mataram Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Utara	
		Industri Alat Kesehatan	Industri Alat Kesehatan	Kota Mataram Kab. Lombok Barat	
6	Industri Ekonomi Kreatif	Industri Busana Muslim	Industri Kerajinan Kerang, Mutiara dan Cukli.	Se-NTB Kota Mataram Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah	

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Jenis Komoditi/Produk	Lokasi
		Industri Kriya dan Aneka	Industri Kriya dan Aneka	Se-NTB
		Industri Multimedia	Industri Multimedia	Se-NTB

D. Penahapan Pembangunan Industri Prioritas

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan Industri Prioritas sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan		
		Pengalengan Ikan, Ikan Awet (Kering dan Asap), Abon Ikan, Tepung Ikan, Frozen Food (Bakso Ikan, Sosis, Nugget), Terasi, Kerupuk Ikan, fillet, Suplemen Ikan.	Pengalengan Ikan, Suplemen Ikan, fillet, Ikan Beku, Minyak Ikan, Bumbu Kaldu Ikan.	Pengalengan Ikan, Suplemen Ikan, fillet, Ikan Beku, Minyak Ikan, Bumbu Kaldu Ikan.
		Industri Hasil Laut Lainnya		
		Karagenan, Dodol, Manisan, Biskuit, Agar-agar, Norie, Garam Beryodium.	Bioplastik, Garam Beryodium.	Cangkang Kapsul, Alginat.
		Industri Berbasis Ternak Ruminansia		
		Daging Beku, Permen Susu Sapi, Abon Sapi, Daging Kaleng, Dendeng, Kornet, Kerupuk Kulit, Kerupuk Paru.	Susu untuk Kesehatan (susu cair, bubuk dan condensed), Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu.	Mentega, Keju, Gelatin, Tepung Tulang, Yogurt, Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu.
Industri Berbasis Ternak Unggas				
Daging Unggas Beku, Fillet, aneka olahan tradisional dalam kemasan dan pangan fungsional lainnya (kerupuk ceker, kerupuk usus,	Daging Unggas Beku, Fillet, aneka olahan tradisional dalam kemasan dan pangan fungsional lainnya (kerupuk ceker, kerupuk usus,			

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		nugget, sosis, dan lainnya).	nugget, sosis, dan lainnya).	
		Industri Olahan Kopi		
		Kopi Bubuk Kemasan Sachet, Kopi Siap Saji, Parfum,	Kopi dekafeinasi, Aneka pangan olahan berbasis kopi organik, Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi.	Aneka pangan olahan berbasis kopi organik, Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi.
		Industri Olahan Kelapa		
		Minyak Goreng, Virgin Coconut Oil (VCO), Nata De Coco.	Vulcanic Oil, Santan Bubuk, Santan Sachet, Hydro coco.	Krim,
		Industri Olahan Gula Aren		
		Gula Briket, Gula Semut, Minuman Herbal, Manisan.	Gula Aren Cair Sachet.	
		Industri Olahan Mente		
		Kacang Mente, Dodol, Manisan, Abon.	Tepung mente, Sirup, Selai, Suplemen.	Suplemen
		Industri Olahan Jagung		
		Tepung, sirup jagung, mie jagung, pasta jagung, jagung, dodol, permen, tortilla jagung.	Minyak jagung, gula jagung.	
		Industri Olahan Coklat		
		Bubuk Coklat, Coklat Batang, Makanan dan minuman dari coklat.	Bubuk coklat, Lemak coklat, Makanan dan minuman dari coklat, Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	
		Industri Sayur dan Buah		
		Manisan buah, Selai buah, Permen, Sirup, Dodol, Aneka Saos dan Sambal, Keripik Sayur, Ekstrak sayur, ekstrak buah, Buah/sayuran dalam kaleng.	Buah/sayuran dalam kaleng, Fruit/vegetable layer, Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah	Fruit/vegetable layer, Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah
		Industri Olahan Porang		

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
			Tepung porang, mie dan pangan fungsional lainnya.	Tepung porang, mie dan pangan fungsional lainnya.
		Industri Olahan Bawang		
		Bawang Goreng, Sambal Bawang, Bubuk Bawang.	Bawang Goreng, Sambal Bawang, Bubuk Bawang.	
2	Industri Hulu Agro	Industri Barang Dari Kayu		
		Serbuk Kayu, Triplek, Interior dan Exterior, Miniatur Edukasi, Kerajinan dan ukir-ukiran dari Kayu dan limbah pengolahan kayu.	High tech interior dan exterior bersertifikat industri hijau, Veneer, Take wood, Block wood, Knock Down, Interior dan Exterior, Miniatur Edukasi, Kapal Kayu,	High tech interior dan exterior bersertifikat industri hijau, High value kerajinan dan furniture, Veneer, Take wood, Block wood, Knock Down, Interior dan Exterior, Miniatur Edukasi.
		Industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
		Minyak atsiri, Kayu Putih, Kemiri, Madu, Gula Aren, Rotan, Ketak, Bambu.	Minyak atsiri, Kayu Putih, Kemiri, Madu, Gula Aren, Rotan, Ketak, Bambu.	Minyak atsiri, Kayu Putih, Kemiri, Madu, Gula Aren, Rotan, Ketak, Bambu.
		Industri Pakan		
		Pakan Unggas, Pakan Ternak, Pakan Ikan.	Pakan Unggas, Pakan Ternak, Pakan Ikan. Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture	Pakan Unggas, Pakan Ternak, Pakan Ikan. Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture
		Industri Pupuk Organik		
	Pupuk majemuk organik.	Pupuk majemuk organik.	Pupuk majemuk organik.	
3	Industri Permesinan, Alat Transportasi dan Energi Terbaru	Industri Permesinan		
		Mesin Computer Numerical Control (CNC Plasma Cutting, CNC Printer 3D, CNC Bubut, CNC Milling); Industrial tools; Otomasi proses produksi pengolahan pangan, Pemeliharaan mesin/peralatan industri; mesin kemasan,	Mesin Computer Numerical Control (CNC); Industrial tools; Otomasi proses produksi pengolahan pangan, Flexible Machining center, Smart home appliances, Motor/generator listrik, Baterai, Solar cell, Perancangan pabrik, Jasa	Mesin Computer Numerical Control (CNC); Industrial tools; Otomasi proses produksi pengolahan pangan, Flexible Machining center, Otomasi Rekayasa Teknologi Tepat Guna, Smart home appliances, Motor/generator listrik, Baterai, Solar cell, Perancangan

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		pemeliharaan mesin/peralatan industri.	proses industry (presisi dan bernilai tambah tinggi), Pemeliharaan mesin/peralatan industri.	pabrik, Jasa proses industry (presisi dan bernilai tambah tinggi), pemeliharaan mesin/peralatan industri.
		Industri Alat Transportasi		
		Komponen otomotif dan perkapalan, kendaraan listrik, perawatan otomotif dan perkapalan.	Komponen otomotif dan perkapalan, kendaraan listrik, perawatan otomotif dan perkapalan.	Pesawat terbang propeller, Komponen pesawat, Perawatan pesawat
		Industri Energi Terbarukan		
		Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Angin.	Biodiesel, Bioetanol, Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang.	Biodiesel, Bioetanol, Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang.
4	Industri Hasil Pertambangan	Industri Smelter dan Turunannya		
			Semen, Keramik Pupuk, kabel listrik, gypsum.	Semen, Keramik Pupuk, kabel listrik, gypsum.
5	Industri Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	Industri Kimia		
		Disinfektan, Olahan Limbah non-organik, olahan limbah B3	Disinfektan, Olahan Limbah non-organik, olahan limbah B3	Disinfektan, Olahan Limbah non-organik, olahan limbah B3
		Industri Farmasi Herbal		
		High value tea kelor, Suplemen berbasis rimpang dan rempah, garam kosmetik	High value tea kelor, Suplemen berbasis rimpang dan rempah, garam kosmetik	High value tea kelor, Suplemen berbasis rimpang dan rempah, garam kosmetik
		Industri Kosmetik Herbal		
		Sabun, Pasta Gigi, Produk Perawatan Muka, Produk Perawatan Rambut, Produk Perawatan Badan, Aneka Kosmetik Rumput Laut, Rimpang dan	Sabun, Pasta Gigi, Produk Perawatan Muka, Produk Perawatan Rambut, Produk Perawatan Badan, Aneka Kosmetik Rumput Laut, Rimpang dan	Sabun, Pasta Gigi, Produk Perawatan Muka, Produk Perawatan Rambut, Produk Perawatan Badan, Aneka Kosmetik Rumput Laut, Rimpang dan Rempah.

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
6	Industri Ekonomi Kreatif	Rempah.	Rempah.	
		Industri Alat Kesehatan		
		Produk disposable and consumables, Hospital Furniture, Implan Ortopedi, Electromedical devices, Diagnostic instrument, Software and IT, Diagnostics reagents.	Produk disposable and consumables, Hospital Furniture, Implan Ortopedi, Electromedical devices, Diagnostic instrument, PACS (Picture Archiving and communication System), Software and IT, Diagnostics reagents, POCT (Point of Care Testing), Radiologi.	Produk disposable and consumables, Hospital Furniture, Implan Ortopedi, Electromedical devices, Diagnostic instrument, PACS (Picture Archiving and Communication System), Software and IT, Diagnostics reagents, POCT (Point of Care Testing), Radiologi.
		Moslem Fashion Industry		
		Serat Tekstil, Pewarna Alam, Kain Tenun, Desain, Konveksi, Produk dari Kulit, Aksesoris dan Perhiasan.	Serat Tekstil, Pewarna Alam, Kain Tenun, Desain, Konveksi, Produk dari Kulit, Aksesoris dan Perhiasan.	Serat Tekstil, Pewarna Alam, Kain Tenun, Desain, Konveksi, Produk dari Kulit, Aksesoris dan Perhiasan.
		Industri Kriya dan Aneka		
		Kerajinan dan Aksesoris Mutiara, Kerang, Cukli, Gerabah, Keramik, Ketak, rotan, Bambu, Pandan, eceng Gondok.	Kerajinan dan Aksesoris Mutiara, Kerang, Cukli, Gerabah, Keramik, Ketak, rotan, Bambu, Pandan, eceng Gondok.	Kerajinan dan Aksesoris Mutiara, Kerang, Cukli, Gerabah, Keramik, Ketak, rotan, Bambu, Pandan, eceng Gondok.
		Industri Multimedia		
		Fotografi, Film, Video, Animasi.	Fotografi, Film, Video, Animasi.	Fotografi, Film, Video, Animasi.

E. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Prioritas Provinsi

Dalam upaya memfokuskan capaian pembangunan Industri Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menitik-beratkan kepada Potensi Sumber Daya Alam Daerah, potensi pemanfaatan lahan kosong dan peluang pasar maka dijabarkan Sasaran, Strategi dan Rencana Program Pembangunan Industri unggulan per jenis industri sebagai berikut:

1. Industri Pangan

1.1. Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut Lainnya

Tabel 3.5. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut Lainnya

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan ikan dan hasil laut lainnya yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p> <p>b) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>c) Peningkatan SDM dibidang industri pengolahan ikan dan hasil laut;</p> <p>d) Terpenuhinya standarisasi dan mutu produk pengolahan ikan;</p> <p>e) Terdapat dukungan sarana dan prasarana serta intervensi teknologi untuk pengolahan ikan dan hasil laut lainnya;</p> <p>f) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;</p> <p>g) Peningkatan kemitraan antara sektor industri olahan pangan berbasis ikan dan hasil laut lainnya dengan petani dan nelayan.</p>	<p>a) Peningkatan peran asosiasi industri olahan ikan untuk meningkatkan jumlah produksi;</p> <p>b) Terciptanya kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk;</p> <p>c) Adanya diversifikasi produk industri olahan ikan dan hasil laut lainnya sehingga memberikan nilai tambah lebih;</p> <p>d) Penguatan industri pangan melalui modernisasi dan alih teknologi;</p> <p>e) Peningkatan mutu makanan dan kemasan melalui penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek;</p> <p>f) Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya;</p> <p>g) Terdapat penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya.</p>	<p>a) Terciptanya peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar internasional;</p> <p>b) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya;</p> <p>c) Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional;</p> <p>d) Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri besar terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan di Provinsi NTB;</p> <p>e) Meningkatnya industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya dengan prinsip hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) meningkatnya penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya;</p> <p>g) meningkatnya diversifikasi produk olahan, jaminan mutu berstandar internasional, dan</p>

		keamanan produk.
Strategi		
<p>a) Melakukan pemetaan potensi ikan dan hasil laut lainnya sebagai bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya;</p> <p>c) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar nasional dan global;</p> <p>d) Mengembangkan penelitian berkelanjutan dengan menggandeng perguruan tinggi agar terciptanya keberlangsungan industri yang bertumbuh dan memberi nilai tambah kepada masyarakat;</p> <p>e) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan supaya mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi;</p> <p>f) Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas.</p>		
Rencana Program		
2020 – 2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b) Memperkuat pemodal usaha dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>c) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan</p>	<p>a) Mendorong peningkatan peran asosiasi pelaku industri olahan ikan dan hasil laut lainnya;</p> <p>b) Meningkatkan kemitraan dengan OPD terkait secara berkesinambungan agar menjamin tersedianya bahan baku;</p> <p>c) Meningkatkan mutu dan standarisasi produk agar mampu menembus pasar nasional maupun pasar internasional;</p> <p>d) Meningkatkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi berkelanjutan;</p> <p>e) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan olahan ikan;</p>	<p>a) Meningkatkan pengembangan kluster industri pengolahan ikan dan hasil laut dalam rangka diversifikasi produk.</p> <p>b) Mendorong Pengembangan Industri pengolahan ikan dan Hasil Laut pada zona Kawasan Industri;</p> <p>c) Meningkatkan pengembangan teknologi Industri Ikan dan Hasil Laut yang lebih modern serta memenuhi standar internasional;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan;</p> <p>e) Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan pangan;</p> <p>f) Meningkatkan mutu kemasan olahan ikan untuk meningkatkan daya saing;</p>

<p>instansi terkait;</p> <p>d) Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>e) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;</p> <p>f) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi; dan</p> <p>g) Meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan.</p>	<p>f) Memfasilitasi terwujudnya kawasan industri terpadu pengolahan ikan dan hasil laut lainnya;</p> <p>g) Mengembangkan sentra-sentra pengolahan ikan yang terintegrasi dengan sumber bahan baku;</p> <p>h) Mendorong peningkatan investasi industri berbasis ikan dan hasil laut lainnya;</p> <p>i) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat.</p>	<p>g) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri olahan ikan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan Pendidikan dan pelatihan;</p> <p>h) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan pangan;</p> <p>i) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern.</p>
---	---	---

1.2. Industri Pengolahan Berbasis Ternak Ruminansia

Tabel 3.6. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Berbasis Ternak Ruminansia

Sasaran		
2020-2024	2025 - 2029	2030-2040
<p>a) Pemetaan potensi untuk pengembangan industri berbasis ternak ruminansia;</p> <p>b) Meningkatnya kerjasama dengan OPD terkait untuk menjamin kestabilan ketersediaan bahan baku;</p> <p>c) Pemenuhan standarisasi dan mutu produk olahan berbasis ternak ruminansia;</p> <p>d) Adanya kerjasama sektor terkait dengan perguruan tinggi atau balai penelitian dalam <i>Research and Development</i> untuk</p>	<p>a) Terciptanya sentra rumah produksi ternak ruminansia di daerah yang telah ditentukan;</p> <p>b) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi bahan baku ternak ruminansia;</p> <p>c) Terbentuknya asosiasi industri olahan berbasis ternak ruminansia yang proaktif membuka peluang bagi pelaku pemula (inkubasi);</p> <p>d) Tercapainya peningkatan daya</p>	<p>a) Adanya pengembangan diversifikasi produk olahan susu yang inovatif dan bernilai tambah;</p> <p>b) Meningkatnya nilai tambah ekonomi yang didapatkan masyarakat dari komoditi olahan ternak ruminansia;</p> <p>c) Meningkatnya penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk hasil olahan berbasis ternak ruminansia;</p> <p>d) Berkembangnya</p>

<p>pengembangan kualitas olahan berbasis ternak ruminansia;</p> <p>e) Terwujudnya penetrasi pasar baik dalam skala domestik maupun nasional;</p> <p>f) Adanya pemetaan klaster industri pengolahan ternak ruminansia di daerah yang telah ditetapkan;</p> <p>g) Meningkatnya kemitraan antara industri olahan susu dengan petani peternak.</p>	<p>saing produk melalui pemenuhan standar dan mutu sesuai permintaan pasar;</p> <p>e) Terbentuknya segmentasi pasar lokal menjadi skala nasional dan berbasis ekspor;</p> <p>f) Adanya peningkatan penerapan sertifikasi, standarisasi (SNI), dan halal;</p> <p>g) Adanya penguatan kemitraan dengan pihak terkait untuk menjamin distribusi pemasaran lokal dan internasional.</p>	<p>kluster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri olahan berbasis ternak ruminansia di sentra produksi terpilih;</p> <p>e) Berkembangnya industri pengolahan ternak ruminansia berbasis hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) Adanya penguatan pengembangan dan penelitian terkait pengembangan industri turunan olahan berbasis ternak ruminansia.</p>
<p>Strategi</p> <p>a) Melalui koordinasi dengan OPD terkait, adanya upaya peningkatan produktifitas sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Memperkuat proses produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna secara efisien;</p> <p>c) Menciptakan iklim investasi yang sehat serta penataan mekanisme pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri;</p> <p>d) Mengembangkan sistem distribusi logistik untuk meningkatkan nilai ekspor;</p> <p>e) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku;</p> <p>f) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (eksisting);</p> <p>g) Memperluas penetrasi pasar melalui promosi secara berkelanjutan;</p> <p>h) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan industri pangan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i>.</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2020-2024</p> <p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b) Meningkatkan efisiensi</p>	<p style="text-align: center;">2025-2029</p> <p>a) Mendorong peran aktf sentra olahan berbasis ternak ruminansia untuk meningkatkan produktifitas IKM yang ada;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri olahan berbasis ternak ruminansia melalui penelitian dan</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Meningkatkan kemampuan IKM untuk membuat diversifikasi produk (pengembangan pohon industri olahan berbasis ternak ruminansia);</p> <p>b) Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan peternak untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri olahan berbasis ternak ruminansia agar</p>

<p>proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>c) Memperkuat pemodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>d) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan berbasis ternak ruminansia;</p> <p>e) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri.</p>	<p>pengembangan yang berkelanjutan;</p> <p>c) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan berbasis ternak ruminansia terintegrasi;</p> <p>d) Mendorong peran asosiasi untuk memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan berbasis ternak ruminansia;</p> <p>e) Mendorong standarisasi produk agar mampu bersaing di pasar;</p> <p>f) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan penetrasi pasar industri olahan berbasis ternak ruminansia.</p>	<p>mampu mendapatkan hasil yang optimal;</p> <p>c) Memperkuat sinergi dengan OPD terkait dalam upaya meningkatkan produk IKM olahan berbasis ternak ruminansia melalui standarisasi SNI;</p> <p>d) Membangun pusat informasi industri olahan susu di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan;</p> <p>e) Meningkatkan standar mutu produk dengan melengkapi atribut produk;</p> <p>f) Mendorong pengembangan dan penelitian berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri turunan olahan berbasis ternak ruminansia.</p>
---	--	--

1.3. Industri Olahan Berbasis Ternak Unggas

Tabel 3.7. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Olahan Berbasis Ternak Unggas

Sasaran		
2020-2024	2025 - 2029	2030-2040
<p>a) Pemetaan potensi lokasi dan zona untuk pengembangan industri olahan berbasis ternak unggas;</p> <p>b) Meningkatnya kerjasama dengan OPD terkait untuk menjamin kestabilan ketersediaan bahan baku;</p> <p>c) Adanya kerjasama sektor terkait dengan perguruan tinggi atau</p>	<p>a) Terciptanya sentra produksi olahan berbasis ternak unggas di daerah yang telah ditentukan;</p> <p>b) Peningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi untuk diversifikasi produk olahan berbasis ternak unggas;</p> <p>c) Tercapainya</p>	<p>a) Adanya pengembangan diversifikasi produk olahan ternak unggas yang inovatif dan bernilai tambah;</p> <p>b) Meningkatnya nilai tambah ekonomi yang didapatkan masyarakat dari komoditi olahan berbasis ternak unggas;</p> <p>c) Meningkatnya penerapan sertifikasi</p>

<p>balai penelitian dalam <i>Research and Development</i> untuk pengembangan kualitas olahan turunan olahan berbasis ternak unggas;</p> <p>d) Adanya pengembangan skema pembiayaan dan bantuan modal yang kompetitif bagi industri;</p> <p>e) Peningkatan keahlian dan keterampilan SDM di bidang industri olahan berbasis ternak unggas;</p> <p>a) Peningkatan kemitraan antara industri olahan berbasis ternak unggas dengan petani peternak;</p> <p>b) Terbentuknya asosiasi industri olahan berbasis ternak unggas yang proaktif membuka peluang bagi pelaku pemula (inkubasi).</p>	<p>peningkatan daya saing produk melalui pemenuhan standar dan mutu sesuai permintaan pasar;</p> <p>d) Adanya peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan branding produk;</p> <p>e) Adanya penguatan kemitraan dengan pihak terkait untuk menjamin distribusi pemasaran lokal dan internasional;</p> <p>f) Pemenuhan standarisasi dan mutu produk olahan berbasis ternak unggas;</p>	<p>dan standarisasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk hasil olahan berbasis ternak unggas;</p> <p>d) Berkembangnya kluster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri olahan berbasis ternak unggas di sentra produksi terpilih;</p> <p>e) Berkembangnya industri pengolahan berbasis ternak unggas hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) Adanya penguatan pengembangan dan penelitian terkait pengembangan industri turunan olahan berbasis ternak unggas.</p> <p>g) Terbentuknya segmentasi pasar lokal menjadi skala nasional dan berbasis ekspor.</p>
Strategi		
<p>a) Melalui koordinasi dengan OPD terkait, adanya upaya peningkatan produktifitas sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Memperkuat proses produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna secara efisien;</p> <p>c) Menciptakan iklim investasi yang sehat serta penataan mekanisme pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri;</p> <p>d) Mengembangkan sistem distribusi logistik untuk meningkatkan nilai ekspor;</p> <p>e) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (eksisting);</p> <p>f) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan industri pangan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i>.</p>		
Rencana Program		
<p style="text-align: center;">2020–2024</p> <p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku,</p>	<p style="text-align: center;">2025-2029</p> <p>a) Mendorong peran aktif sentra olahan berbasis ternak unggas untuk meningkatkan produktifitas IKM yang ada;</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Meningkatkan kemampuan IKM untuk membuat diversifikasi produk (pengembangan pohon industri olahan berbasis ternak</p>

<p>koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>c) Memperkuat pemodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>d) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan berbasis ternak unggas;</p> <p>e) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri.</p>	<p>b) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri olahan berbasis ternak unggas melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan;</p> <p>c) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan olahan berbasis ternak unggas terintegrasi;</p> <p>d) Mendorong peran asosiasi untuk memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru di bidang industri olahan berbasis ternak unggas;</p> <p>e) Mendorong standarisasi produk agar mampu bersaing di pasar;</p> <p>f) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar untuk meningkatkan penetrasi pasar industri olahan berbasis ternak unggas.</p>	<p>unggas);</p> <p>b) Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan peternak untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri olahan berbasis ternak unggas agar mampu mendapatkan hasil yang optimal;</p> <p>c) Memperkuat sinergi dengan OPD terkait dalam upaya meningkatkan produk IKM olahan berbasis ternak unggas melalui standarisasi SNI;</p> <p>d) Membangun pusat informasi industri olahan susu di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan berbasis ternak unggas;</p> <p>e) Meningkatkan standar mutu produk dengan melengkapi atribut produk;</p> <p>f) Mendorong pengembangan dan penelitian berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri turunan olahan berbasis ternak unggas.</p>
---	--	--

1.4. Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan

Tabel 3.8. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan

Sasaran		
2020-2024	2025 - 2029	2030-2040
<p>a) Terdapat peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan bahan baku berkualitas;</p>	<p>a) Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri produk olahan hasil pertanian dan perkebunan;</p> <p>b) Meningkatnya mutu</p>	<p>a) Meningkatnya mutu dan kualitas hasil industri berbasis hasil pertanian dan perkebunan;</p> <p>b) Terdapat diversifikasi</p>

<p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku di sektor hulu pertanian dan perkebunan;</p> <p>c) Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkecimpung sebagai pelaku industri olahan hasil pertanian dan perkebunan;</p> <p>d) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan hasil pertanian dan perkebunan;</p> <p>e) Terbentuknya klaster industri berbasis hasil pertanian dan perkebunan;</p> <p>f) Terjalinnnya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;</p> <p>g) Meningkatnya penelitian dan pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan untuk menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi;</p> <p>h) Terdapat pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor hulu untuk menjamin produktivitas.</p>	<p>dan standar produk olahan hasil pertanian dan perkebunan yang memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional;</p> <p>c) Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna untuk diversifikasi produk olahan komoditi hasil pertanian dan perkebunan;</p> <p>d) Hadirnya iklim investasi yang mampu mendorong pengembangan industri olahan hasil pertanian dan perkebunan;</p> <p>e) Terciptanya produk olahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi;</p> <p>f) Adanya penelitian berkelanjutan dalam upaya diversifikasi pohon industri komoditi sektor pertanian dan perkebunan;</p> <p>g) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri olahan hasil pertanian dan perkebunan.</p>	<p>produk dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d) Tersedianya kawasan peruntukan industri besar terpadu pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang memiliki prinsip berwawasan lingkungan;</p> <p>h) Adanya pengembangan kluster industri berbasis komoditi pertanian dan perkebunan;</p> <p>i) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan hemat energi dan ramah lingkungan dan pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>j) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses pra produksi, produksi dan pasca produksi.</p>
---	--	--

Strategi

- a) Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi di sektor hulu untuk menjamin kontinuitas bahan baku yang berkualitas tinggi;
- b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan formal maupun informal sebagai upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan;
- c) Peningkatan mutu produk olahan makanan dan minuman agar mampu menembus skala pasar yang lebih luas;
- d) Penguatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi olahan makanan dan minuman yang berkualitas.

- e) Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pembiayaan yang meringankan beban IKM;
- f) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pangan makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk;
- g) Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan lokal.

Rencana Program

2020-2024	2025-2029	2030-2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pemetaan potensi sektor hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara kontinyu; b) Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang industri olahan berbasis pertanian dan perkebunan; c) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna ramah lingkungan dalam untuk meminisir kerugian pasca panen; d) Mendorong pengembangan kluster industri berbasis pertanian dan perkebunan yang produktif dan terintegrasi; e) Memberikan fasilitas dan bantuan mesin dan peralatan kepada IKM untuk standarisasi produk olahan; f) Mengembangkan skema pembiayaan pelaku industri dan penguatan investasi; g) Mendorong penelitian dan pengembangan di sektor hulu untuk menjamin kuantitas, 	<ul style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk olahan sehingga mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri; b) Mengembangkan Kawasan Peruntukan industri olahan berbasis komoditi pertanian dan perkebunan sebagai upaya menarik investasi; c) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar milik negara maupun swasta dalam upaya untuk meningkatkan segmentasi pasar, baik pasar nasional maupun pasar global; d) Melakukan kajian dan penelitian terkait potensi turunan produk olahan berbasis komoditi hasil pertanian dan perkebunan yang mampu diterima oleh pasar lokal dan mancanegara; e) Mengembangkan sentra-sentra dan kalster industri pengolahan yang terintegratif dengan sumber bahan baku dan potensi pasar; f) Mengembangkan industri pendukung untuk kontinuitas 	<ul style="list-style-type: none"> a) Memperkuat kebijakan daerah untuk penguatan dan pengembangan industri olahan berbasis komoditi pertanian dan perkebunan; b) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri; c) pengolahan makanan dan minuman melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan; d) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pangan; e) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan; f) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai upaya untuk peningkatan daya saing produk.

kualitas dan kontinuitas bahan baku.	sumber bahan penolong industri olahan hasil pertanian dan perkebunan.	
--------------------------------------	---	--

2. Industri Hulu Agro

2.1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu

Tabel 3.9. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Pemetaan potensi untuk pengembangan industri bahan dari kayu; b) Meningkatnya kerjasama dengan OPD terkait untuk menjamin kestabilan ketersediaan bahan baku; c) Pemenuhan standarisasi dan mutu produk barang dari kayu; d) Adanya kerjasama sektor terkait dengan perguruan tinggi atau balai penelitian dalam Research and Development untuk pengembangan kualitas olahan kayu; e) Adanya pengembangan skema pembiayaan dan bantuan modal yang kompetitif bagi industri; f) Adanya pemetaan klaster industri barang dari kayu di daerah yang telah ditetapkan; g) Peningkatan kemitraan antara 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terciptanya sentra produksi industri barang dari kayu di daerah yang telah ditentukan; b) Peningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi barang dari kayu untuk diversifikasi produk berbahan baku kayu; c) Terbentuknya asosiasi industri barang dari kayu yang proaktif membuka peluang bagi pelaku pemula (inkubasi); d) Tercapainya peningkatan daya saing produk melalui pemenuhan standar dan mutu sesuai permintaan pasar; e) Terbentuknya segmentasi pasar lokal menjadi skala nasional dan berbasis ekspor; f) Adanya peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI) dan branding produk; g) Adanya penguatan kemitraan dengan pihak terkait untuk menjamin distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pengembangan diversifikasi produk barang dari kayu yang inovatif dan bernilai tambah; b) Meningkatnya nilai tambah ekonomi yang didapatkan masyarakat dari komoditi barang dari kayu; c) Meningkatnya penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk hasil industri barang dari kayu; d) Berkembangnya kluster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri barang dari kayu di sentra produksi terpilih; e) Berkembangnya industri barang dari kayu yang ramah lingkungan; f) Adanya penguatan pengembangan dan penelitian terkait pengembangan industri barang dari kayu.

<p>industri barang dari kayu dengan industri penebangan.</p>	<p>pemasaran lokal dan internasional.</p>	
<p>Strategi</p>		
<p>a) Melalui koordinasi dengan OPD terkait upaya peningkatan produktifitas sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku; b) Memperkuat proses produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna secara efisien; c) Menciptakan iklim investasi yang sehat serta penataan mekanisme pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri; d) Mengembangkan sistem distribusi logistik untuk meningkatkan nilai ekspor; e) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku; f) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (eksisting); dan g) Memperluas penetrasi pasar melalui promosi secara berkelanjutan.</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2020-2024</p> <p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, b) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; c) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; d) Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi</p>	<p style="text-align: center;">2025-2029</p> <p>a) Mendorong peran aktif sentra olahan barang dari kayu untuk meningkatkan produktifitas IKM yang ada; b) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri barang dari kayu melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan; c) Melakukan diversifikasi produk hutan dan mengembangkan pengolahan barang dari kayu terintegrasi; d) Mendorong peran asosiasi untuk memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru di bidang industri barang dari kayu; e) Mendorong standarisasi produk sesuai SNI agar mampu bersaing di pasar; f) Menjalin kerjasama</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Meningkatkan kemampuan IKM untuk membuat diversifikasi produk (pengembangan pohon industri barang dari kayu); b) Meningkatkan penyuluhan kepada pengrajin untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri barang dari kayu agar mampu mendapatkan hasil yang optimal; c) Memperkuat sinergi dengan OPD terkait dalam upaya meningkatkan produk IKM barang dari kayu melalui standarisasi SNI; d) Membangun pusat informasi industri barang dari kayu di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan; e) Meningkatkan standar dan mutu produk dengan melengkapi label/atribut produk; f) Mendorong</p>

<p>akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>e) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri.</p>	<p>dengan perusahaan besar untuk meningkatkan penetrasi pasar industri barang dari kayu;</p> <p>g) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan peralatan tepat guna dalam meningkatkan produktifitas.</p>	<p>pengembangan dan penelitian berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri barang dari kayu.</p>
--	--	--

2.2. Industri Hasil Hutan Bukan Kayu

Tabel 3.10. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Hasil Hutan Bukan Kayu

Sasaran		
2020 – 2023	2024-2029	2030-2040
<p>a) Terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor hulu untuk menjamin ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan pasar dan kebutuhan industri pengolahan;</p> <p>b) Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang industri olahan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>c) Terciptanya kerjasama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga penelitian dalam <i>Research and Development</i> untuk pengembangan sektor hulu dan hilir;</p> <p>d) Terstandarisasinya produk olahan hasil hutan bukan kayu yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan</p>	<p>a) Peningkatan jumlah industri baru untuk industri olahan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>b) Adanya kenaikan kelas IKM olahan hasil hutan bukan kayu dari IKM informal menuju IKM formal dan dari kecil ke menengah;</p> <p>c) Terciptanya diversifikasi produk olahan hasil hutan bukan kayu yang sesuai dengan mutu dan standar pasar;</p> <p>d) Terwujudnya produk olahan hasil hutan bukan kayu sebagai produk khas daerah;</p> <p>e) Terdapat pemetaan pemanfaatan lahan potensial untuk perkembangan komoditi hasil hutan bukan kayu;</p> <p>f) Meningkatnya jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara</p>	<p>a) Terbentuknya industri baru yang mengangkat konsep industri olahan hasil hutan bukan kayu yang berwawasan lingkungan/industri hijau;</p> <p>b) Adanya peningkatan diversifikasi komoditi hasil hutan bukan kayu menjadi produk kosmetik dan farmasi;</p> <p>c) Terjalinnnya kemitraan dengan perusahaan nasional dan global dalam upaya peningkatan pangsa pasar;</p> <p>d) Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>e) Terciptanya Rantai pasokan bahan baku industri olahan hasil hutan bukan kayu yang stabil dan berkelanjutan;</p> <p>f) Penyempurnaan mutu</p>

<p>penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dalam proses produksi;</p> <p>e) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mendukung perkembangan industri olahan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>f) Terpetakannya potensi industri olahan hasil hutan bukan kayu yang akan dikembangkan;</p> <p>g) Adanya Agroindustri dan Agro wisata di sektor hasil hutan bukan kayu berdasarkan potensi dan kearifan lokal.</p>	<p>kontinyu untuk produk olahan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>g) Meningkatnya inovasi penelitian dan pengembangan produk dan sitem produksi;</p> <p>h) Tersedianya fasilitas pendukung Infrastruktur dalam rangka mendukung pergerakan produk-produk industri;</p> <p>i) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi berkembangnya industri olahan hasil hutan bukan kayu.</p>	<p>industri hasil hutan bukan kayu dan turunannya yang sesuai dengan standar;</p> <p>g) Berkembangnya sentra-sentra industri olahan berbasis hasil hutan bukan kayu;</p> <p>h) Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri olahan hasil hutan bukan kayu.</p>
Strategi		
<p>a) Penyusunan kebijakan yang mendukung berkembangnya industri hasil hutan bukan kayu;</p> <p>b) Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan OPD hulu dan kelompok-kelompok tani dan budidaya dalam upaya meningkatkan keberlanjutan produksi komoditi hasil hutan bukan kayu yang berkualitas;</p> <p>b) Mengembangkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan penambahan sarana dan prasarana produksi tepat guna ramah lingkungan;</p> <p>c) Pengembangan penelitian berkelanjutan untuk memastikan eksistensi lahan hasil hutan bukan kayu tetap berproduksi;</p> <p>d) Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri;</p> <p>e) Peningkatan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hasil hutan bukan kayu yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;</p> <p>f) Pengembangan dan peningkatan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan.</p>		
Rencana Program		
<p style="text-align: center;">2020 – 2023</p> <p>a) Bersama OPD terkait melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri olahan hasil hutan bukan kayu di NTB;</p> <p>b) Melakukan pemetaan potensi lahan komoditi hasil hutan</p>	<p style="text-align: center;">2024-2029</p> <p>a) Meningkatkan kemasan dan sertifikasi halal pada produk olahan hasil hutan bukan kayu di daerah;</p> <p>b) Mengembangkan fasilitas penunjang produksi agar pelaku industri mampu menerapkan <i>Good Manufacturing</i></p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Mengembangkan produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas.</p> <p>b) Melakukan kajian dan riset secara mendalam untuk potensi hasil hutan bukan kayu organik;</p> <p>c) Menjalin kemitraan</p>

<p>bukan kayu secara menyeluruh;</p> <p>c) Melakukan <i>Research and Development</i> terkait potensi pengembangan industri hasil hutan bukan kayu;</p> <p>d) Melakukan standarisasi mutu produk olahan hasil hutan bukan kayu sesuai mutu dan standar SNI;</p> <p>e) Memfasilitasi mesin dan peralatan untuk pelaku industri hasil hutan bukan kayu agar mampu meningkatkan produktivitas;</p> <p>f) Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas hasil hutan bukan kayu untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>g) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas hasil hutan bukan kayu di sentra-sentra industri;</p> <p>h) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan serta fasilitasi permodalan bagi IKM;</p>	<p><i>Practices</i> (GMP);</p> <p>c) Melakukan promosi hasil produk olahan hasil hutan bukan kayu melalui event-event nasional maupun internasional;</p> <p>d) Menciptakan diversifikasi dan meningkatkan nilai tambah produk olahan hasil hutan bukan kayu dalam rangka pengembangan produk khas daerah;</p> <p>e) Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri hulu berbasis komoditi hasil hutan bukan kayu;</p> <p>f) Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas;</p> <p>g) Meningkatkan mutu produk industri hasil hutan bukan kayu melalui peningkatan SDM, alih teknologi dan pemenuhan standar;</p> <p>h) Meningkatkan kemitraan melalui kerja sama antara usaha kecil menengah dan besar dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>i) Membangun industri turunan hasil hutan bukan kayu secara bertahap dan berkelanjutan.</p>	<p>Dalam dan Luar negeri dalam upaya penetrasi pasar domestik dan global;</p> <p>d) Mengembangkan lahan hasil hutan bukan kayu eksisting agar mampu memberikan nilai tambah bagi petani;</p> <p>e) Meningkatkan kemampuan petani di sektor hasil hutan bukan kayu dalam meningkatkan kapasitas produksi;</p> <p>f) Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk olahan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>g) Meningkatkan kemampuan pengolahan komoditi hasil hutan bukan kayu melalui penelitian dan pengembangan;</p> <p>h) Memfasilitasi peningkatan investasi industri hasil hutan bukan kayu yang ramah lingkungan;</p> <p>i) Mengembangkan kluster industri hasil hutan bukan kayu terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai.</p>
--	---	---

2.3 Industri Pakan

Tabel 3.11 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pakan

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya peta potensi bahan baku yang memiliki potensi kontinuitas jangka panjang dan bersifat ramah lingkungan; b) Terdapat Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang pengolahan pakan; c) Adanya sinergi dengan OPD terkait untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang berkualitas; d) Terdapat peran serta masyarakat dan peternak untuk menjadikan lamtoro dan jagung sebagai pakan alternatif secara masif; e) Adanya intervensi fasilitas sarana/prasarana dan penggunaan teknologi pengolahan untuk skala industri; f) Adanya fasilitas skema pembiayaan yang tepat sasaran untuk menumbuhkembangkan industri pakan; g) Terwujudnya NTB sebagai daerah swasembada pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terbentuknya asosiasi pelaku industri pakan ternak; b) Adanya perbaikan dan pengawasan mutu produk pakan secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga kualitas produk; c) Penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> dalam proses produksi pakan ternak; d) Terbentuknya sentra industri pakan di daerah yang telah ditetapkan; e) Adanya peran serta Lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dalam rangka pengembangan industri pakan; f) Pemenuhan standar dan mutu produk pakan ternak agar mampu diterima di pasar nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terjalinnnya kerjasama dengan perusahaan besar sebagai mitra IKM dalam memasarkan produk pakan; b) Terciptanya Pelaku industri yang kompetitif dengan produknya yang berdaya saing di pasar nasional; c) Penguatan peran regulasi dan kebijakan yang mendukung pemberian manfaat kepada sentra IKM; d) Penguatan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> terkait untuk pengembangan dan penelitian produk pakan ternak yang berkelanjutan; e) Adanya upaya untuk mendorong industry pakan ternak yang ramah lingkungan.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a) Pemetaan potensi sektor hulu rangka menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku; b) Peningkatan kompetensi dan <i>skill</i> Sumber Daya Manusia dalam menggunakan teknologi untuk memanfaatkan potensi bahan baku yang ada; c) Peningkatan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam rangka optimasi system produksi yang efektif dan efisien; d) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, perusahaan, dan OPD terkait dalam upaya pengembangan produk pakan ternak yang berdaya 		

saing;		
Rencana Program		
2020-2023	2024-2029	2030-2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Mendorong tersedianya SDM yang kompeten dan tersedianya pasokan bahan baku; b) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil bahan baku untuk pakan ternak; c) Mendorong pembangunan sarana/fasilitas proses produksi pengolahan pakan ternak; d) Mengembangkan skema modal usaha dan manajemen keuangan yang akuntabel bagi IKM olahan pakan; e) Mendorong dan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam memasifkan pakan ternak alternatif; f) Mendorong terciptanya sertifikasi dan jaminan mutu produk; g) Mewujudkan Provinsi NTB sebagai daerah yang mandiri pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Mendorong terbentuknya asosiasi pelaku industry pakan ternak; b) Mendorong penerapan Good Manufacturing Practices dalam kegiatan proses produksi; c) Mendorong peningkatan pengawasan kualitas dan mutu produk; d) Memfasilitasi terbentuknya sentra industry olahan pakan ternak di setiap daerah yang telah ditetapkan; e) Mendorong peran Lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam pengembangan dan penelitian produk terkait maupun mesin/peralatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar sebagai upaya untuk penetrasi pasar bagi produk pakan ternak; b) Mendorong ekosistem industri pakan ternak yang kompetitif sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar nasional; c) Memperkuat peran kebijakan dan regulasi melalui aturan yang memberikan manfaat bagi IKM; d) Meningkatkan kajian dan penelitian dalam mengembangkan pakan ternak yang berkelanjutan; e) Mewujudkan industry pakan ternak berwawasan ramah lingkungan.

2.4 Industri Pupuk Organik

Tabel. 3.12 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pupuk Organik

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat peta potensi sampah baik organik dari sektor hulu penghasil sampah hingga di setiap TPA yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat; b) Terciptanya pemanfaatan sampah sebagai salah satu sumber energi alternatif terbaharukan; c) Terjalinnnya sinergi dan kolaborasi antara 	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pelibatan pemerintah desa sebagai pelaksana dan operator dalam pengelolaan sampah; b) Terdapat master plan pengolahan dari hulu hingga hilir yang berkesesuaian dengan kondisi masing-masing desa; c) Terdapat peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya peningkatan pemanfaatan sampah organik oleh bank sampah berbasis komunitas masyarakat; b) Adanya penguatan peran bank sampah, komunitas masyarakat peduli lingkungan dan pihak swasta dalam menerapkan pola

<p>pemerintah daerah dengan perusahaan swasta, yaitu bank sampah dan juga Perguruan Tinggi dan balai penelitian lainnya;</p> <p>d) Adanya fasilitas pembangunan bank sampah berbasis komunitas di setiap daerah yang ditetapkan sebagai upaya untuk rumah produksi pupuk organik;</p> <p>e) Adanya pengembangan teknologi dan inovasi permesinan pengolahan dan daur ulang sampah menjadi berbagai produk pupuk organik;</p> <p>f) Terbangunnya pabrik pupuk organik skala besar untuk memenuhi kebutuhan sektor hulu.</p>	<p>nilai tambah ekonomi bagi komunitas masyarakat pengolah sampah organik sebagai pupuk organik;</p> <p>d) Terbangunnya penguatan penelitian dan pengembangan akan konversi pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk organik;</p> <p>e) Terwujudnya pengolahan sampah organik dalam bentuk berbagai diversifikasi produk siap pakai;</p> <p>f) Terwujudnya pemanfaatan sampah dengan metode Extended Producer Responsibility (EPR).</p>	<p>hidup zero waste dan pengembangan pupuk organik;</p> <p>c) Terdapat peningkatan pemanfaatan mesin dan peralatan dalam proses produksi pupuk organik;</p> <p>d) Adanya penguatan peran koordinasi dengan pemerintah pusat dan Lembaga/badan terkait untuk peningkatan produksi pupuk;</p> <p>e) Adanya peningkatan budaya pengelolaan sampah berbasis Lembaga Pendidikan di setiap kabupaten/kota.</p>
<p>Strategi</p>		
<p>a) Peningkatan peran serta masyarakat secara massif dalam menerapkan pola hidup zero waste;</p> <p>b) Peningkatan kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan, bank sampah dan perusahaan swasta dalam pengelolaan sampah menjadi pupuk organik;</p> <p>c) Peningkatan peran lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan terkait pengelolaan sampah yang efektif dan efisien;</p> <p>d) Penguatan peran perusahaan besar dalam penetrasi pasar hasil olahan sampah dari bank sampah dan komunitas masyarakat peduli lingkungan;</p> <p>e) Peningkatan peran teknologi dan inovasi permesinan dalam mewujudkan pengolahan sampah organik yang efisien;</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2020-2023</p> <p>a) Melakukan pemetaan potensi pengolahan sampah mulai dari sektor hulu penghasil sampah organik hingga pemetaan potensi TPA;</p> <p>b) Mendorong pemanfaatan sampah sebagai salah satu bahan baku untuk menghasilkan pupuk organik;</p> <p>c) Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan swasta, perusahaan milik negara dan bank sampah dalam upaya bersama pengelolaan</p>	<p style="text-align: center;">2024-2029</p> <p>a) Mendorong pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik;</p> <p>b) Memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam membuat master plan pengolahan sampah secara terpadu;</p> <p>c) Mendorong peran bank sampah dan komunitas dalam meningkatkan kreatifitas agar pemanfaatan sampah memberikan nilai</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Mendorong peningkatan peran bank sampah berbasis komunitas/masyarakat dalam pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik;</p> <p>b) Memfasilitasi peningkatan penggunaan mesin dan peralatan dalam pengelolaan sampah agar tercipta pemanfaatan sampah yang efektif dan efisien;</p>

<p>sampah menjadi pupuk organik;</p> <p>d) Mendorong terbentuknya bank sampah di setiap desa melalui intervensi anggaran dana desa;</p> <p>e) Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dan mesin/peralatan pengolah sampah sebagai upaya untuk mewujudkan pemanfaatan sampah yang efektif dan efisien;</p> <p>f) Membangun pabrik pupuk organik skala besar untuk memenuhi kebutuhan sektor hulu.</p>	<p>tambah ekonomi yang tinggi;</p> <p>d) Memperkuat penelitian dan pengembangan pengolahan sampah terpadu menjadi pupuk organik;</p> <p>e) Melakukan peningkatan diversifikasi produk olahan sampah organik menjadi berbagai jenis pupuk organik;</p> <p>f) Mendorong uji coba metode Extended Producer Responsibility (EPR).</p>	<p>c) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Lembaga/badan terkait dalam upaya pengelolaan sampah organik terpadu;</p> <p>d) Memperkuat peran Lembaga Pendidikan dalam membangun kemandirian pengelolaan sampah menjadi pupuk organik.</p>
--	---	---

3. Industri Permesinan, Alat Transportasi dan Energi Baru Terbarukan

3.1 Industri Permesinan

Tabel 3.13 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Permesinan

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Terjamin adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang industri permesinan;</p> <p>b) Terciptanya <i>master plan</i> yang komprehensif dalam upaya mengintegrasikan ketersediaan bahan baku sampai proses pembuatan mesin;</p> <p>c) Terwujudnya peran sentral IKM mesin dan logam dalam rantai pasokan komponen industri permesinan;</p> <p>d) Terciptanya standarisasi produk permesinan yang lolos uji dan standarisasi SNI;</p> <p>e) Terwujudnya fasilitasi IKM agar memiliki produk yang berdaya saing dan mampu dipasarkan baik secara offline maupun online;</p> <p>f) Adanya produk</p>	<p>a) Terwujudnya peran asosiasi permesinan dan logam untuk melakukan produksi yang efisien;</p> <p>b) Meningkatnya kemampuan IKM untuk memenuhi peralatan/mesin pasar lokal;</p> <p>c) Terjalannya kerjasama dengan balai penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi untuk melakukan <i>Research and Development</i> dalam upaya pengembangan mesin tepat guna;</p> <p>d) Adanya evaluasi berkala terhadap pemanfaatan permesinan yang diciptakan oleh IKM logam sebagai upaya untuk <i>quality control</i>;</p>	<p>a) Meningkatnya penggunaan teknologi dalam upaya efisiensi produksi mesin dan peralatan pendukung lainnya;</p> <p>b) Terwujudnya peningkatan jumlah IKM modern yang mampu memproduksi mesin dan peralatan yang memenuhi standar SNI;</p> <p>c) Terbangunnya sentra pembuatan mesin di setiap daerah yang telah ditetapkan;</p> <p>d) Adanya penguatan dalam hal penelitian dan pengembangan produk permesinan dalam upaya mencapai produk yang efisien dan ramah lingkungan;</p> <p>e) Terwujudnya</p>

<p>permesinan IKM yang terdaftar dalam E-katalog pemerintah daerah untuk memenuhi pasar lokal;</p> <p>g) Adanya fasilitasi bagi IKM atau Lembaga Pendidikan dalam perancangan dan produksi permesinan.</p>	<p>e) Adanya penguatan IKM yang memproduksi mesin dan peralatan dalam hal kelembagaan, manajemen usaha, akses pembiayaan dan pemasaran produk.</p>	<p>industri permesinan yang berdaya saing sehingga mampu melakukan penetrasi pasar nasional dan global.</p>
<p>Strategi</p>		
<p>a) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang industri permesinan;</p> <p>b) Pengembangan <i>Research and Development</i> dalam upaya penyempurnaan teknologi untuk proses penyediaan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>c) Pemanfaatan teknologi agar terciptanya efisiensi dalam proses produksi pembuatan permesinan;</p> <p>d) Mendorong regulasi dan kebijakan yang melindungi produk permesinan IKM NTB;</p> <p>e) Mendorong peningkatan kemampuan IKM untuk memproduksi permesinan agar mampu memenuhi lokal dan nasional.</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p>2020-2024</p>	<p>2025-2029</p>	<p>2030-2040</p>
<p>a) Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi di design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika;</p> <p>b) Melakukan kajian menyeluruh (integrated supply chain) mulai dari pasokan bahan baku sampai penguasaan teknologi;</p> <p>c) Meningkatkan peran IKM dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;</p> <p>d) Mengembangkan komponen logam dan bukan logam terstandar untuk efisiensi industri pemesinan dan industri lainnya;</p> <p>e) Mendorong produk IKM Permesinan NTB untuk</p>	<p>a) Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi;</p> <p>b) Mendorong kestabilan produksi peralatan dan mesin;</p> <p>c) Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri penunjang Industri Prioritas melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>d) Melakukan kajian evaluasi secara berkala terhadap permesinan yang sudah dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi mesin ke depannya.</p> <p>e) Memfasilitasi</p>	<p>a) Mengembangkan teknologi dan penyediaan bahan baja, non-baja, serta bahan pendukung dalam upaya memenuhi kebutuhan industri permesinan;</p> <p>b) Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang Kawasan industri khusus pemesinan;</p> <p>c) Mendorong terbentuknya sentra IKM pembuatan permesinan di setiap kabupaten/kota yang telah ditetapkan;</p> <p>d) Meningkatkan penelitian dan pengembangan produk permesinan dalam upaya</p>

<p>memasarkan produknya melalui E-Katalog pemerintah daerah;</p> <p>f) Mendorong dan Memfasilitasi IKM Permesinan dan/atau Lembaga Pendidikan dalam rancang mesin.</p>	<p>penguatan IKM yang memproduksi mesin dan peralatan dalam hal kelembagaan, manajemen usaha, akses pembiayaan dan pemasaran produk.</p>	<p>mencapai produk yang efisien dan ramah lingkungan;</p> <p>e) mewujudkan industri permesinan yang berdaya saing sehingga mampu penetrasi pasar nasional dan global.</p>
--	--	---

3.2 Industri Alat Transportasi

Tabel 3.14 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Alat Transportasi

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Teridentifikasinya kebutuhan dan permasalahan terkait pengembangan industri alat transportasi;</p> <p>b) Tersusunnya rancangan kebutuhan industri pendukung komponen alat transportasi;</p> <p>c) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri alat transportasi;</p> <p>d) Terdapat kemitraan dengan Lembaga penelitian dalam upaya pengembangan produk secara berkelanjutan;</p> <p>e) Tersedianya akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank) untuk pengembangan industri alat transportasi.</p>	<p>a) Terbentuknya industri komponen pendukung alat transportasi;</p> <p>b) Penguatan kerjasama dengan stakeholders eksternal demi terciptanya perluasan segmentasi pasar;</p> <p>c) Terciptanya pengembangan dan inovasi produk alat transportasi yang memenuhi ketentuan;</p> <p>d) Terwujudnya pengembangan dan penelitian berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing pelaku industri multimedia;</p> <p>e) Meningkatnya kegiatan promosi melalui <i>events</i> dan pameran lokal, nasional maupun internasional.</p>	<p>a) Terbentuknya industri alat transportasi dalam satu wilayah industri yang terintegrasi;</p> <p>b) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara stakeholders dalam peningkatan industri alat transportasi;</p> <p>c) Meningkatnya nilai investasi dalam pengembangan industri alat transportasi;</p> <p>d) Terdapat pengembangan jaringan edukasi skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku industri alat transportasi.</p>
Strategi		
<p>a) Mengidentifikasi kebutuhan komponen pendukung pengembangan industri alat transportasi;</p> <p>b) Mendorong pengembangan inovasi pelaku industri alat transportasi melalui event multisektor;</p> <p>c) Mendorong pengembangan komponen pendukung industri alat transportasi;</p> <p>a) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku industri alat transportasi dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk;</p>		

b) Pengembangan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi; c) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai pendorong kreativitas, <i>benchmarking</i> , <i>research</i> dan <i>development</i> , perluasan pangsa pasar dan promosi.		
Rencana Program		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
a) Melakukan pemetaan permasalahan dan kebutuhan alat transportasi secara komprehensif; b) Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku industri alat transportasi; c) Pembentukan komunitas / asosiasi pelaku industri alat transportasi; d) Penelitian dan pengembangan peningkatan kualitas produk industri alat transportasi. e) Pemanfaatan teknologi dan peralatan tepat guna dalam proses produksi; f) Pengembangan kualitas produksi dan manajemen keuangan industri alat transportasi.	a) Mengembangkan industri komponen alat transportasi; b) Penguatan kelembagaan asosiasi pelaku industri alat transportasi; c) Mendukung penguatan <i>research & development</i> dibidang pengembangan bahan baku, teknologi, desain produk, dan skema pemasaran industri alat transportasi; d) Meningkatkan peran pelaku industri alat transportasi melalui acara festival dan/atau pameran produk berskala nasional dan internasional.	a. Mendorong pengembangan sentra yang terintegrasi dengan pasar dalam satu wilayah industri; b. Mendorong peningkatan nilai investasi di sektor industri alat transportasi; c. Meningkatkan pengembangan keterampilan pelaku industri alat transportasi secara berkesinambungan; d. Mengembangkan kemitraan untuk memperluas pangsa pasar, baik skala nasional maupun internasional;

3.3 Industri Energi Baru Terbarukan

Tabel 3.15 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Energi Baru Terbarukan

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
a) Tersedianya peta potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan energy secara kontinyu dan kajian pengolahan bahan baku yang terintegrasi dari hulu ke hilir; b) Terwujudnya peningkatan Sumber Daya Manusia terkait	a) Terwujudnya Penguatan industri energy baru dan terbarukan melalui modernisasi dan alih teknologi; b) Terciptanya kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar	a) Terbentuknya industri baru yang mengangkat konsep industri olahan biodiesel, bioethanol dan biogas; b) Terwujudnya konversi bahan bakar konvensional menjadi bahan bakar hasil industry baru

<p>penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>c) Tersedianya sarana dan prasarana serta teknologi untuk pengembangan industri energi baru terbarukan;</p> <p>d) Terbentuknya klaster industri Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Angin;</p> <p>e) Terjalinnnya sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;</p> <p>f) Terwujudnya kegiatan pendampingan dan penyuluhan secara kontinyu untuk perbaikan kualitas produksi biogas dan pemeliharaan mesin pembangkit.</p>	<p>produk;</p> <p>c) Adanya diversifikasi produk industri biodiesel dan biogas sehingga memberikan nilai tambah lebih dan menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas;</p> <p>d) Terbentuknya klaster industri biodiesel, bioethanol dan pembangkit listrik tenaga gelombang;</p> <p>e) Peningkatan mutu bahan bakar produk industry energy baru dan terbarukan;</p> <p>f) Berkembangnya diversifikasi produk industri olahan biodiesel, bioethanol dan biogas.</p>	<p>dan terbarukan;</p> <p>c) Terciptanya Rantai pasok bahan baku industri biodiesel, bioethanol dan biogas yang stabil dan berkelanjutan;</p> <p>d) Penyempurnaan mutu industri biodiesel, bioethanol dan biogas dan turunannya yang sesuai dengan standar;</p> <p>e) Berkembangnya sentra-sentra industry biodiesel, bioethanol dan biogas;</p>
---	---	--

Strategi

- a) Mengembangkan penelitian berkelanjutan dengan menggandeng perguruan tinggi agar terciptanya keberlangsungan industri yang bertumbuh dan memberi nilai tambah kepada masyarakat;
- b) Mengembangkan Energi Baru Terbarukan untuk mendukung pembangunan pusat-pusat ekonomi baru
- c) Mendorong konversi energy konvensional ke energi baru dan terbarukan;
- d) Menjamin harga keekonomisan yang wajar akan energy baru dan terbarukan;
- e) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan dalam upaya menciptakan efisiensi dalam proses produksi;
- f) Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas;
- g) Menjamin tersedianya Infrastruktur yang memadai dalam upaya mendukung terwujudnya industri energi baru terbarukan yang kholistik.

Rencana Program

2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Melakukan pemetaan potensi sumber daya alam yang mendukung tersedianya pasokan energy secara kontinyu dan kajian pengolahan bahan baku yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p>	<p>a) Meningkatkan penguatan struktur industri energy baru dan terbarukan melalui modernisasi dan alih teknologi;</p> <p>b) Memperluas dan meningkatkan kemitraan dengan</p>	<p>a) Meningkatkan penciptaan industri baru yang mengangkat konsep industri olahan biodiesel, bioethanol dan biogas;</p> <p>b) Meningkatkan upaya konversi bahan</p>

<p>b) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>c) Membangun dan memfasilitasi sarana dan prasarana serta teknologi untuk pengembangan industri energi baru terbarukan;</p> <p>d) Mendorong terbentuknya klaster industri Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Angin;</p> <p>e) Menjalani Kerjasama dan sinergi dengan balai penelitian milik pemerintah maupun swasta serta dengan perguruan tinggi;</p> <p>f) Memberikan pendampingan dan penyuluhan secara kontinyu untuk perbaikan kualitas produksi biogas dan pemeliharaan mesin pembangkit.</p>	<p><i>stakeholders</i> terkait dalam upaya penetrasi pasar produk;</p> <p>c) Menciptakan energi alternatif berbasis industri biodiesel dan biogas sehingga memberikan nilai tambah lebih dan menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas;</p> <p>d) Terbentuknya sentra dan klaster industri biodiesel, bioethanol dan pembangkit listrik tenaga gelombang;</p> <p>e) Peningkatan mutu bahan bakar produk industry energy baru dan terbarukan;</p> <p>f) Berkembangnya diversifikasi produk industri olahan biodiesel, bioethanol dan biogas.</p>	<p>bakar konvensional menjadi bahan bakar hasil industry baru dan terbarukan;</p> <p>c) Terciptanya Rantai pasok bahan baku industri biodiesel, bioethanol dan biogas yang stabil dan berkelanjutan;</p> <p>d) Melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan terkait mutu industri biodiesel, bioethanol dan biogas dan turunannya yang sesuai dengan standar;</p> <p>e) Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sentra-sentra industry biodiesel, bioethanol dan biogas.</p>
--	---	--

4. Industri Pertambangan

4.1 Industri Smelter dan Turunannya

Tabel 3.16 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Smelter dan Turunannya

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Terdapat kajian dan penelitian terkait penyusunan <i>master plan</i> dan <i>sitiplan</i> untuk pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat;</p> <p>b) Terdapat studi kelayakan dan kajian dalam upaya konstruksi</p>	<p>a) Terdapat kajian pemetaan potensi industry turunan smelter yang akan dibangun sebagai industry pendukung;</p> <p>b) Adanya penelitian dan pengembangan potensi industri pabrik semen, pabrik</p>	<p>a) Terdapat pengembangan teknologi dan inovasi untuk mendukung industry turunan smelter;</p> <p>b) terwujudnya industri turunan smelter skala besar dengan orientasi ekspor;</p>

<p>pembangunan industri turunan smelter.</p> <p>c) Adanya koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk arah strategis Kawasan Peruntukan Industri (KPI);</p> <p>d) Terwujudnya perencanaan pembangunan pabrik industri turunan smelter (semen, pupuk dan olahan lainnya);</p> <p>e) Adanya pemetaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang industri turunan smelter;</p> <p>f) Terciptanya hilirasi industri turunan smelter secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p>	<p>pupuk, pabrik kabel, dan potensi lainnya sebagai industri turunan smelter;</p> <p>c) Terciptanya iklim investasi yang ramah investor untuk akselerasi industri turunan smelter;</p> <p>d) Adanya dukungan infrastruktur yang memadai dalam upaya mewujudkan industri turunan smelter;</p> <p>e) Meningkatnya partisipasi Sumber Daya Manusia lokal dalam upaya mengisi kebutuhan tenaga kerja.</p>	<p>c) meningkatnya keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilir;</p> <p>d) meningkatnya peran teknologi dan inovasi untuk memproduksi produk turunan smelter;</p> <p>e) terwujudnya pengembangan lanjutan terkait teknologi tepat guna kebutuhan industri turunan smelter.</p>
Strategi		
<p>a) penguatan peta dan road map potensi industri turunan smelter secara berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan;</p> <p>b) mendorong peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM lokal sebagai bagian dari tenaga kerja industri turunan smelter;</p> <p>c) mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna serta inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing produk serta meningkatkan produksi;</p> <p>d) mengembangkan industri turunan smelter yang berorientasi ekspor.</p>		
Rencana Program		
<p>a) Melakukan kajian dan penelitian terkait penyusunan <i>master plan</i> dan <i>siteplan</i> untuk pembangunan industri turunan smelter;</p> <p>b) Mematangkan studi kelayakan dan kajian dalam upaya konstruksi pembangunan industri turunan smelter;</p> <p>c) Melakukan koordinasi secara komprehensif dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terkait arah strategis industri</p>	<p style="text-align: center;">2025-2029</p> <p>a) menjalankan hasil kajian pemetaan potensi industri turunan smelter yang akan dibangun sebagai industri pendukung;</p> <p>b) meningkatkan penelitian dan pengembangan potensi industri pabrik semen, pabrik pupuk, pabrik kabel, dan potensi lainnya sebagai industri turunan smelter;</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Mendorong pengembangan teknologi untuk memproduksi bahan semen, pupuk dan industri olahan lainnya;</p> <p>b) Membangun industri turunan smelter skala besar dengan orientasi ekspor;</p> <p>c) Meningkatkan keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilir;</p>

<p>turunan smelter di Kawasan Industri (KI);</p> <p>d) Adanya pemetaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang industri turunan smelter;</p> <p>e) mendorong hilirisasi industri turunan smelter secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p>	<p>c) menciptakan iklim investasi yang ramah investor untuk akselerasi industri turunan smelter;</p> <p>d) membangun dukungan infrastruktur yang memadai dalam upaya mewujudkan industry turunan smelter;</p> <p>e) Penguatan peran Sumber Daya Manusia lokal dalam upaya mengisi kebutuhan tenaga kerja.</p>	<p>d) Mendorong pengembangan teknologi dan inovasi untuk memproduksi produk turunan smelter;</p> <p>e) Memfasilitasi pengembangan lanjut teknologi tepat guna kebutuhan industri turunan smelter.</p>
---	---	---

5. Industri Kimia, Farmasi Herbal dan Alat Kesehatan

5.1 Industri Kimia

Tabel 3.17 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Kimia

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Terdapat peta potensi daerah penghasil Limbah Organik, Non Organik dan limbah B3;</p> <p>b) Terwujudnya penguatan SDM, Kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas antar pelaku usaha pada sektor industri kimia ;</p> <p>c) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pengolahan limbah kimia;</p> <p>d) Adanya kerjasama yang baik dengan kelompok petani yang bertujuan penggunaan pupuk organik yang dihasilkan;</p> <p>e) Terdapat sinergisitas antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam</p>	<p>a) Terciptanya sentra olahan limbah sebagai salah satu sektro penyerapan tenaga kerja;</p> <p>b) Terciptanya pemanfaatan fasilitas sarana usaha pengolahan pupuk kimia organik;</p> <p>c) Adanya peningkatan fasilitas sertifikasi produk (Uji Komposisi);</p> <p>d) Meningkatkan Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait (peneliti) dalam teknologi produksi dan memperluas pasar;</p> <p>e) Meningkatnya akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi</p>	<p>a) Meningkatnya tingkatan/golongan industri pengolahan kimia;</p> <p>b) Adanya pengawasan dan pengembangan secara berkelanjutan agar produk olahan limbah kimia tetap memiliki sertifikasi dan standar mutu SNI;</p> <p>c) Tumbuhnya IKM pengolahan limbah kimia yang berdaya saing;</p> <p>d) Terwujudnya kemandirian daerah dalam mengelola limbah;</p> <p>e) Meningkatnya diversifikasi produk olahan limbah menjadi produk bernilai tinggi.</p>

pengelolaan limbah.	pelaku industri Kimia.	
Strategi		
<p>a) Memetakan potensi daerah sebagai penghasil limbah dan membuat peta (road map) pengembangan industri kimia berkelanjutan;</p> <p>b) Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya sertifikasi produk industri kimia;</p> <p>c) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya mencapai proses produksi yang efektif dan efisien;</p> <p>d) Penguatan proses produksi untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;</p> <p>e) Menciptakan iklim industri yang kondusif melalui dukungan regulasi dan peningkatan pembiayaan serta penanaman modal;</p>		
Rencana Program		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi lokasi pengembangan industri kimia;</p> <p>b) Melakukan sertifikasi SDM pelaku Industri kimia melalui pelatihan ketrampilan;</p> <p>c) Meningkatkan peran aktif kelembagaan perusahaan besar dan konektifitas antar pelaku industri kimia;</p> <p>d) Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi tepat guna dan ramah lingkungan;</p> <p>e) Mempertemukan IKM Industri kimia dengan lembaga atau kelompok pengguna manfaat industri kimia;</p> <p>f) Membangun Kerjasama dan sinergi antara pemerintah, dunia bisnis dan perguruan tinggi dalam pengelolaan limbah.</p>	<p>a) Mendorong terbangunnya sentra industri kimia yang padat tenaga kerja;</p> <p>b) Memberikan fasilitas yang memadai sebagai upaya peningkatan produktifitas di bidang industri kimia;</p> <p>c) Mendorong peningkatan sertifikasi produk industri kimia;</p> <p>d) Mengikuti dan menyelenggarakan event promosi lokal, regional dan international;</p> <p>e) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dan pemerintah daerah lainnya dalam upaya meningkatkan permodalan pelaku industri kimia</p>	<p>a) Mengembangkan industri turunan dan diversifikasi produk industri kimia;</p> <p>b) Memberikan penyuluhan dan pelatihan terpadu kepada IKM untuk meningkatkan mutu dan standar produk industri kimia;</p> <p>c) Melakukan pembinaan dan pengawasan agar IKM tumbuh dan berkembang menjadi IKM berdaya saing;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan sentra-sentra olahan limbah di daerah sebagai upaya membangun kemandirian daerah dalam pengelolaan limbah.</p>

5.2 Industri Farmasi Herbal

Tabel 3.18 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Farmasi Herbal

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
a) Teridentifikasinya	a) Terbentuknya industri	a) Terbentuknya

<p>kebutuhan dan permasalahan terkait pengembangan industri farmasi herbal;</p> <p>b) Tersusunnya rancangan kebutuhan industri pendukung komponen industri farmasi</p> <p>c) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri farmasi;</p> <p>d) Terjalinnnya Kerjasama dan sinergi dengan Lembaga penelitian dalam upaya meningkatkan difiersifikasi produk farmasi herbal;</p> <p>e) Tersedianya akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank) untuk pengembangan industri farmasi.</p>	<p>komponen pendukung industri farmasi</p> <p>b) Penguatan kerjasama dengan stakeholders eksternal demi terciptanya perluasan segmentasi pasar;</p> <p>c) Terciptanya pengembangan dan inovasi produk industri farmasi yang memenuhi ketentuan;</p> <p>d) Terwujudnya peningkatan pengembangan dan penelitian berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing pelaku industri farmasi;</p> <p>e) Meningkatnya kegiatan promosi melalui <i>events</i> dan pameran lokal, nasional maupun internasional.</p>	<p>industri farmasi dalam satu wilayah industri yang terintegrasi;</p> <p>b) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara stakeholders dalam peningkatan industri farmasi;</p> <p>c) Meningkatnya nilai investasi dalam pengembangan industri farmasi;</p> <p>d) Terdapat pengembangan jaringan edukasi skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku industri farmasi;</p> <p>e) Meningkatnya <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i> dalam proses produksi.</p>
Strategi		
<p>d) Mengidentifikasi kebutuhan komponen pendukung pengembangan industri farmasi;</p> <p>e) Mendorong pengembangan inovasi pelaku industri farmasi melalui event multisektor;</p> <p>f) Mendorong pengembangan komponen pendukung industri farmasi;</p> <p>d) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku industri alat transportasi dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk;</p> <p>e) Pengembangan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi;</p> <p>f) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai pendorong kreativitas, <i>benchmarking</i>, <i>research</i> dan <i>development</i>, perluasan pangsa pasar dan promosi.</p>		
Rencana Program		
<p style="text-align: center;">2020-2024</p> <p>a) Melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait pengembangan industri farmasi herbal;</p> <p>b) Melakukan penyusunan rancangan kebutuhan industri pendukung komponen</p>	<p style="text-align: center;">2025-2029</p> <p>a) Mengembangkan industri komponen pendukung industri farmasi;</p> <p>b) meningkatkan kerjasama dengan stakeholders terkait demi terciptanya perluasan segmentasi pasar;</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Terbentuknya industri farmasi dalam satu wilayah industri yang terintegrasi;</p> <p>b) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara stakeholders dalam</p>

<p>industri farmasi;</p> <p>c) Memfasilitasi pelatihan keterampilan dan skill dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri farmasi;</p> <p>d) Membangun kerjasama dan sinergi dengan Lembaga penelitian dalam upaya meningkatkan difersifikasi produk farmasi herbal;</p> <p>e) Mendorong tersedianya akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank) untuk pengembangan industri farmasi.</p>	<p>c) mengembangkan mutu dan inovasi produk industri farmasi herbal yang memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku;</p> <p>d) meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing pelaku industri farmasi;</p> <p>e) melakukan promosi secara berkelanjutan melalui <i>events</i> dan pameran lokal, nasional maupun internasional untuk peningkatan segmen pasar.</p>	<p>peningkatan industri farmasi;</p> <p>c) Meningkatnya nilai investasi dalam pengembangan industri farmasi;</p> <p>d) Terdapat pengembangan jaringan edukasi skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku industri farmasi;</p> <p>a) Meningkatnya <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i> dalam proses produksi.</p>
--	---	---

5.3 Industri Kosmetik Herbal

Tabel 3.19 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Kosmetik Herbal

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Pemetaan potensi dan kajian lokasi sumber bahan baku untuk industri kosmetik herbal;</p> <p>b) Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan sudah tersertifikasi untuk menjadi pelaku atau tenaga kerja di bidang industri kosmetik herbal;</p> <p>c) Adanya fasilitasi terkait proses legalitas dan izin edar dari produk IKM kosmetik;</p> <p>d) Terpenuhinya standar dan mutu produk kosmetika herbal;</p> <p>e) Adanya peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam implementasi</p>	<p>a) Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri kosmetik herbal;</p> <p>b) Terciptanya sentra kosmetik herbal sesuai dengan daerah yang sudah ditentukan;</p> <p>c) Peningkatan pelayanan perizinan IKM Kosmetik;</p> <p>d) Peningkatan standar mutu produk kosmetika herbal;</p> <p>e) Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendorong pengembangan hasil penelitian yang terkait dengan kosmetik herbal</p> <p>f) Adanya diversifikasi</p>	<p>a) Terciptanya peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar internasional;</p> <p>b) Meningkatnya daya saing industri kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat;</p> <p>c) Terjadi sinergisitas antara pusat dan daerah dalam upaya membangun industri kosmetik dalam negeri yang sehat dan berwawasan lingkungan;</p> <p>d) Meningkatnya penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional;</p>

<p>pengembangan hasil penelitian yang terkait dengan kosmetik herbal</p> <p>f) Terbentuknya asosiasi industri kosmetik yang proaktif dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri baik dalam kelembagaan, keuangan dan proses produksi.</p>	<p>produk industri kosmetik herbal sehingga memberikan nilai tambah lebih;</p> <p>g) Penguatan industri kosmetik melalui pemanfaatan teknologi digital.</p>	<p>e) Tersedianya Kawasan industri besar terpadu industri kosmetik di Provinsi NTB;</p> <p>f) Penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri kosmetik dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk.</p>
<p>Strategi</p> <p>a) Melakukan pemetaan potensi bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>b) Meningkatkan pemahaman produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat</p> <p>c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan industri kosmetik herbal;</p> <p>d) Memberikan kemudahan akses perijinan kosmetik herbal</p> <p>e) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar nasional dan global;</p> <p>f) Mengembangkan penelitian berkelanjutan bersama perguruan tinggi, dan lembaga penelitian terkait agar menghasilkan produk-produk kosmetik yang semakin berkualitas agar mampu meningkatkan daya saing produk;</p> <p>g) Memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan dalam proses produksi maupun promosi;</p> <p>h) Melakukan pembentukan dan pembinaan komunitas dan kluster kosmetik di NTB;</p> <p>i) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas.</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2020 - 2024</p> <p>a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait untuk intervensi sektor produksi bahan baku;</p> <p>b) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan, koordinasi dengan instansi terkait, dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang</p>	<p style="text-align: center;">2025-2029</p> <p>a) Mendorong peningkatan peran asosiasi pelaku industri kosmetik;</p> <p>b) Meningkatkan kemitraan dengan OPD terkait secara berkesinambungan agar menjamin tersedianya bahan baku;</p> <p>c) Mengembangkan peningkatan mutu dan standarisasi produk kosmetik herbal agar mampu menembus pasar nasional dan pasar internasional;</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Meningkatkan pengembangan teknologi Industri kosmetik herbal yang lebih modern serta memenuhi standar internasional;</p> <p>b) Membangun pusat informasi kosmetika di lokasi kluster pembangunan industri kosmetik herbal;</p> <p>c) Meningkatkan pengembangan klaster industri kosmetik dalam rangka diversifikasi produk kosmetik herbal;</p>

<p>memadai;</p> <p>c) Menjamin kemudahan akses perizinan untuk mendukung standardisasi produk kosmetik IKM;</p> <p>d) Memberikan akses pembiayaan dan permodalan untuk mendorong percepatan perkembangan produk kosmetik herbal IKM NTB;</p> <p>e) Meningkatkan pemahaman tentang Teknis Denah Bangunan dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB);</p> <p>f) Melakukan diversifikasi bahan baku lokal untuk mengembangkan pengolahan kosmetik;</p> <p>g) Meningkatkan peran Perguruan Tinggi dan insitusi penelitian lainnya dalam melakukan R&D</p>	<p>d) Meningkatkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi berkelanjutan;</p> <p>e) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri kosmetik melalui kegiatan magang di beberapa pabrik kosmetik;</p> <p>f) Meningkatkan fasilitas pelayanan akses perizinan;</p> <p>g) Mengembangkan sentra-sentra industri kosmetik untuk mendorong lahirnya wirausaha baru;</p> <p>h) Mendorong peningkatan investasi industri kosmetik berbasis herbal;</p> <p>i) Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan dan dipersifikasi produk melalui riset yang berkelanjutan.</p>	<p>d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha industri kosmetik herbal;</p> <p>e) Meningkatkan mutu kemasan produk kosmetika herbal untuk meningkatkan daya saing;</p> <p>f) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri kosmetika herbal serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>g) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui pemanfaatn teknologi dan kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;</p> <p>h) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk kosmetik yang baik.</p>
--	--	---

5.4 Industri Alat Kesehatan

Tabel 3.20. Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Alat Kesehatan

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Terdapat sinergi kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang;</p> <p>b) Terciptanya arah kebijakan penggunaan produk alat kesehatan</p>	<p>a) Terdapat center of excellent yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk kebutuhan industri kesehatan;</p> <p>b) Terfasilitasinya akses pembiayaan untuk</p>	<p>a) Meningkatnya kemampuan, kualitas, dan efisiensi industri alat kesehatan;</p> <p>b) Terwujudnya penguasaan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan</p>

<p>pada fasilitas dan layanan Kesehatan;</p> <p>c) Adanya promosi secara berkelanjutan terkait penggunaan alat kesehatan buatan dalam IKM Lokal termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan;</p> <p>d) Terwujudnya peta dan road map industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong;</p> <p>e) tersertifikasinya SDM dengan kompetensi tinggi pada design engineering produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian.</p>	<p>peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi permesinan dan alat pengukuran;</p> <p>c) Terwujudnya proses sertifikasi dan standardisasi serta dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan;</p> <p>d) Tumbuh dan berkembangnya Industri kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji;</p>	<p>bionik (organ buatan) yang menggabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif, dan mikro/nano elektronika;</p> <p>c) Meningkatnya peran center of excellent yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk kebutuhan institusi kesehatan;</p> <p>d) Meningkatnya upaya standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat Kesehatan.</p>
<p>Strategi</p> <p>a) Peningkatan dan pengembangan kemampuan industri dalam penggunaan teknologi dan/peralatan agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;</p> <p>b) Pembinaan manajemen usaha, fasilitasi akses pasar dan pengembangan produk agar mampu memperluas pangsa pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>c) Perbaiki iklim usaha di bidang penyediaan bahan baku, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>d) Pengembangan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri alat kesehatan;</p> <p>e) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi industri alat kesehatan termasuk rancang bangun dan perekayasaan ekosistem industri alat Kesehatan.</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2020-2024</p> <p>a) Mengembangkan kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang;</p> <p>b) Mengembangkan kebijakan penggunaan</p>	<p style="text-align: center;">2025-2029</p> <p>a) Mendirikan center of excellent yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk kebutuhan industri kesehatan;</p> <p>b) Memfasilitasi</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Mengembangkan lanjut untuk penguatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi industri alat kesehatan;</p> <p>b) Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan</p>

<p>produk alat kesehatan pada fasilitas dan layanan Kesehatan;</p> <p>c) Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam IKM Lokal termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan;</p> <p>d) Mengembangkan road map industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong;</p> <p>e) Mengembangkan SDM dengan kompetensi tinggi pada design engineering produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian.</p>	<p>pembiayaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi permesinan dan alat pengukuran;</p> <p>c) Mengembangkan standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan;</p> <p>d) Mengembangkan dan penguatan Industri kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.</p>	<p>aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang menggabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif, dan mikro/nano elektronika;</p> <p>c) Mengembangkan center of excellent yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk kebutuhan institusi kesehatan;</p> <p>d) Mengembangkan lanjut untuk standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat Kesehatan.</p>
---	--	--

6. Industri Ekonomi Kreatif

6.1 Industri Busana Muslim

Tabel 3.21. Sasara, Strategi dan Rencana Program Industri Busana Muslim

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>a) Tersedianya bahan baku dan bahan penolong dengan kualitas dan harga yang stabil;</p> <p>b) Terintegrasinya sentra rantai produksi industri fashion muslim mulai dari pewarnaan, pemintaal benang, pembuatan kain, desain dan pameran fashion show;</p> <p>c) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia terampil dan ahli;</p> <p>d) Adanya revitalisasi dan pengembangan mesin</p>	<p>a) Terciptanya regulasi pemerintah daerah untuk menggunakan produk fashion lokal dalam seragam dinas kantor dan sekolah-sekolah;</p> <p>b) Terciptanya penyerapan tenaga kerja yang merata di setiap rantai produksi industri fashion muslim;</p> <p>c) Terwujudnya <i>green industri fashion</i> yang berkelanjutan;</p> <p>d) Meningkatnya kesadaran pelaku</p>	<p>a) Meningkatnya produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i>;</p> <p>b) Meningkatnya daya saing melalui spesifikasi pada produk tenun dan batik bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> berbahan baku lokal;</p> <p>c) Berkembangnya industri fashion</p>

<p>dan/atau peralatan produksi untuk peningkatan kualitas produk;</p> <p>e) Adanya pengembangan industri fashion muslim yang ramah lingkungan (berbahan baku alam);</p> <p>f) Terbentuknya asosiasi pelaku industri fashion baik tenun di daerah yang sudah ditetapkan.</p>	<p>industri fashion atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>e) Meningkatnya penggunaan pewarna alami sebagai upaya penerapan proses produksi ramah lingkungan.</p>	<p>muslim bermuatan lokal yang memiliki HAKI yang berorientasi ekspor;</p> <p>d) Terwujudnya <i>green industri</i> secara masif di sentra-sentra rantai produksi yang ada;</p>
<p>Strategi</p> <p>f) Peningkatan dan pengembangan kemampuan industri dalam penggunaan teknologi dan/peralatan bukan mesin agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;</p> <p>g) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang pewarna alam, pemintalan benang, pembuatan kain, serta desain motif.</p> <p>h) Pembinaan manajemen usaha, fasilitasi akses pasar dan pengembangan produk agar mampu memperluas pangsa pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>i) Perbaiki iklim usaha di bidang penyediaan bahan baku, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>j) Pengembangan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri busana muslim bermuatan khas daerah.</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2020-2024</p> <p>a) Memberikan pelatihan dan workshop kepada pelaku industri fashion muslim mulai dari rantai proses pewarnaan hingga desain <i>fashion</i>-nya;</p> <p>b) Mendorong kemandirian masing-masing rantai proses produksi (pewarna alam, pemintalan benang, kain, dan desain) agar terbentuk sentra di masing-masing daerah;</p> <p>c) Mendorong integrasi proses produksi dari setiap sub rantai produksi agar terciptanya proses produksi yang efektif dan efisien;</p> <p>d) Implementasi program peningkatan teknologi tepat guna dan/atau peralatan tenun bukan</p>	<p style="text-align: center;">2025-2029</p> <p>a) Mendorong diversifikasi produk Industri tenun dan batik sesuai dengan permintaan pangsa dan segmentasi pasar;</p> <p>b) Mendorong peran asosiasi dan sentra untuk meningkatkan produktivitas dari setiap anggota IKM;</p> <p>c) Meningkatkan pemahaman pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>d) Mengembangkan ketersediaan bahan baku dan penolong (serat dan pewarna alami) yang bersumber dari lokal;</p> <p>e) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>e) Mengintegrasikan rantai produksi secara tepat agar menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing;</p> <p>f) Mendorong spesifikasi dan kekhasan daerah untuk industri tenun dan batik agar mampu bersaing di pasar nasional dan global (<i>competitive advantage</i>);</p> <p>g) Mengembangkan potensi bahan baku dan penolong lokal sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan penolong;</p> <p>h) Mendorong peningkatan peran</p>

<p>mesin agar menghasilkan produk berkualitas;</p> <p>e) Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam dan pewarna alami;</p> <p>f) Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang bergerak dibidang industri busana muslim.</p>	<p>industrial (kualitas desain dan proses produksi);</p> <p>f) Mendorong pemanfaatan peralatan tepat guna untuk meningkatkan produktifitas.</p>	<p>pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan.</p>
---	---	---

6.2 Industri Kriya dan Aneka

Tabel 3.22 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Kriya dan Aneka

Sasaran		
2020-2023	2024-2029	2030-2040
<p>a) Tersedianya peta sentra kerajinan disertai dengan peta permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku industri kriya dan aneka;</p> <p>b) Terjaminnya pasokan jumlah bahan baku yang berkualitas tinggi secara berkelanjutan;</p> <p>c) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri kriya dan aneka;</p> <p>d) Adanya upaya intervensi di sektor hulu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dari daerah sendiri;</p> <p>e) Adanya penelitian dan pengembangan yang terintegrasi guna mencapai industri kriya dan aneka yang berkualitas;</p> <p>f) Adanya pemanfaatan mesin dan peralatan tepat gunan dalam meningkatkan produksi dan mencapai efisiensi;</p> <p>g) Tersedianya akses</p>	<p>a) Meningkatnya peran asosiasi dalam mendorong anggota IKM untuk meningkatkan produktivitas;</p> <p>b) Penguatan kerjasama dengan perusahaan besar dan daerah lainnya demi terciptanya perluasan segmentasi pasar;</p> <p>c) Terciptanya pengembangan dan inovasi desain produk kerajinan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar internasional;</p> <p>d) Terwujudnya pengembangan dan penelitian berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing IKM;</p> <p>e) Meningkatnya kegiatan promosi melalui <i>events</i> dan pameran lokal, nasional maupun internasional untuk memperkenalkan</p>	<p>a) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara rantai produksi hulu, tengah dan hilir dalam upaya meningkatkan rantai nilai tambah kriya ;</p> <p>b) Meningkatnya kualitas IKM kerajinan dengan indikasi meningkatnya serapan tenaga kerja dan bertambahnya nilai investasi;</p> <p>c) Terdapat pengembangan jaringan pemasaran skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku industri kerajinan;</p> <p>d) Terciptanya produk industri kerajinan berkelanjutan dan menjunjung tinggi konsep industri ramah lingkungan.</p>

<p>permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank).</p>	<p>industri kriya dan aneka khas daerah.</p>	
<p>Strategi</p>		
<p>h) Menciptakan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang modern serta didukung kerjasama dengan wilayah penyedia bahan baku untuk menjaga keberlangsungan industri;</p> <p>i) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku industri kerajinan dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk;</p> <p>j) Pengembangan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi;</p> <p>k) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai pendorong kreativitas, <i>benchmarking</i>, <i>research</i> dan <i>development</i>, perluasan pangsa pasar dan promosi.</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2020-2023</p> <p>a) Melakukan kajian dan pemetaan potensi industri kerajinan secara menyeluruh supaya dapat merumuskan kebijakan/program yang tepat;</p> <p>b) Mengadakan pelatihan keterampilan bagi pelaku industri kriya dan aneka baik dari sektor hulu maupun hilirnya;</p> <p>c) Memperkuat kemitraan dengan wilayah penyedia bahan baku melalui koordinasi dengan OPD terkait;</p> <p>d) Mengembangkan potensi lokal bahan baku sebagai upaya untuk mengangkat kekhasan daerah;</p> <p>e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam peningkatan kualitas produk industri kriya dan aneka;</p> <p>f) Mengembangkan kualitas produksi dan manajemen keuangan industri kriya dan aneka.</p>	<p style="text-align: center;">2024-2029</p> <p>a) Mendorong peran asosiasi melalui pemberian insentif bagi IKM yang memiliki kontinuitas produksi yang baik;</p> <p>b) Menjalin kemitraan bisnis dengan perusahaan besar dalam upaya membantu IKM untuk penetrasi pasar;</p> <p>c) Mendorong peran asosiasi dalam meningkatkan kreatifitas untuk pengembangan produk yang terstandarisasi SNI;</p> <p>d) Mendukung penguatan <i>research & development</i> dibidang pengembangan bahan baku, teknologi, desain produk, dan skema pemasaran</p> <p>e) Meningkatkan peran asosiasi dalam promosi produk melalui acara festival dan/atau pameran produk berskala nasional dan internasional.</p>	<p style="text-align: center;">2030-2040</p> <p>a) Meningkatkan nilai rantai produksi melalui pembinaan yang terintegrasi antara rantai produksi hulu;</p> <p>b) Menjamin mutu dan keunikan produk kriya dan aneka agar memiliki ciri kekhasan daerah;</p> <p>c) Mendorong IKM agar naik kelas dari IKM informal menjadi IKM formal agar IKM mampu meningkatkan daya saing produknya;</p> <p>d) Mengembangkan kemitraan untuk memperluas pangsa pasar, baik skala nasional maupun internasional;</p> <p>e) Mendorong penerapan konsep industri kriya dan aneka yang ramah lingkungan.</p>

6.3 Industri Multimedia

Tabel 3.23 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Multimedia

Sasaran		
2020-2024	2025-2029	2030-2040
<p>g) Tersedianya database komunitas multimedia disertai dengan identifikasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku industri;</p> <p>h) Teridentifikasinya spot-spot lokasi untuk pelaku industri multimedia</p> <p>i) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri multimedia;</p> <p>j) Tersedianya akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non-Bank) untuk pengembangan industri multimedia;</p> <p>k) Adanya pusat pengembangan kreativitas dan inovasi;</p> <p>l) Terfasilitasinya proses pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.</p>	<p>g) Meningkatnya peran komunitas dalam mendorong pelaku industri untuk meningkatkan kreatifitas;</p> <p>h) Penguatan kerjasama dengan stakeholders eksternal demi terciptanya perluasan segmentasi pasar;</p> <p>i) Terciptanya pengembangan dan inovasi produk multimediyang memenuhi ketentuan;</p> <p>j) Terwujudnya pengembangan dan penelitian berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing pelaku industri multimedia;</p> <p>k) Meningkatnya kegiatan promosi melalui <i>events</i> dan pameran lokal, nasional maupun internasional.</p>	<p>f) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara stakeholders dalam peningkatan industri multimedia</p> <p>g) Meningkatnya nilai investasi dalam pengembangan industri multimedia;</p> <p>h) Terdapat pengembangan jaringan edukasi skala nasional dan global untuk meningkatkan manfaat kepada pelaku industri multimedia;</p> <p>i) Terciptanya produk industri multimedia yang mendukung pembangunan berkelanjutan.</p>
Strategi		
<p>g) Membangun komunitas multimedia sebagai entitas diskusi dan jejaring kerjasama.</p> <p>h) Mendorong pengembangan kreatifitas pelaku industri multimedia melalui event multisektor.</p> <p>i) Membangun iklim kreatif di kalangan pelaku industri multimedia</p> <p>j) Mendorong introduksi teknologi dalam pengembangan sarana prasana pendukung industri kreatif</p> <p>l) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku industri multimedia dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk;</p> <p>m) Pengembangan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi;</p> <p>n) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai pendorong kreativitas, <i>benchmarking</i>, <i>research</i> dan <i>development</i>, perluasan pangsa pasar dan promosi.</p>		
Rencana Program		
2020-2023	2024-2029	2030-2040

<p>g) Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku industri multimedia.</p> <p>h) Pembentukan komunitas / asosiasi pelaku industri multimedia.</p> <p>i) Penelitian dan pengembangan peningkatan kualitas produk industri multimedia.</p> <p>j) Pengembangan kualitas produksi dan manajemen keuangan industri multimedia.</p> <p>k) Meningkatkan keunggulan industri kreatif berbasis potensi lokal dengan pembinaan dan pemberdayaan yang efektif;</p> <p>l) Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan desain dan teknologi.</p>	<p>f) Penguatan kelembagaan asosiasi pelaku industri multimedia;</p> <p>g) Mendukung penguatan <i>research & development</i> dibidang pengembangan bahan baku, teknologi, desain produk, dan skema pemasaran;</p> <p>h) Meningkatkan peran asosiasi dalam promosi produk melalui acara festival dan/atau pameran produk berskala nasional dan internasional;</p> <p>i) Memperluas akses pasar dengan pengembangan metode pemasaran hasil-hasil industri;</p> <p>j) memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.</p>	<p>e. Menjamin mutu dan keunikan produk kerajinan agar memiliki ciri kekhasan daerah;</p> <p>f. Mendorong IKM agar naik kelas dari IKM informal menjadi IKM formal agar IKM mampu meningkatkan daya saing produknya;</p> <p>g. Mengembangkan kemitraan untuk memperluas pangsa pasar, baik skala nasional maupun internasional;</p> <p>h. Meningkatkan peran Kerjasama antar semua stakeholders dalam menghasilkan karya seni.</p>
---	--	--

IV. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

A. Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan industri baik dalam skala kecil dan menengah sering kali dikaitkan sebagai penyebab adanya kerusakan ekosistem lingkungan. Maka dari itu, dalam upaya pembangunan industri selayaknya disertai dengan program-program yang ramah lingkungan. Adapun program pengelolaan lingkungan akan dilakukan melalui beberapa program, antara lain:

- 1) Menerapkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui: a) pengurangan erosi lahan; b) efisiensi penggunaan air bersih dengan penerapan teknologi modern; serta c) pengurangan kehilangan hasil produksi pasca panen dengan menggunakan teknologi tepat guna ramah lingkungan;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan industri ramah lingkungan dengan cara menyiapkan standar industri hijau dalam industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan sektor lainnya;

- 3) Mengembangkan konservasi terhadap hutan dan lingkungan dengan mengelola sumber daya secara asri dan lestari guna meningkatkan fungsinya sebagai penyedia jasa lingkungan.

B. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Jaringan energi dan kelistrikan menjadi penting dalam aktivitas produksi saat ini dan ke depannya. Kebutuhan industri akan energi dan listrik juga cukup besar dan akan terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga perlu adanya upaya untuk mengembangkan sistem energi dan kelistrikan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan guna mendukung program pembangunan industri. PLN sebagai penyedia utama jaringan kelistrikan memiliki peran sentral dalam pembangunan infrastruktur. Adapun infrastruktur yang akan dikembangkan antara lain 1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi tak terbarukan, energi terbarukan dan sumber energi lainnya; dan 2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk pemenuhan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) diarahkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu;
- 2) Pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) diarahkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa;
- 3) Pengembangan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) diarahkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
- 4) Pengembangan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) diarahkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten

- Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
- 5) Pengembangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) diarahkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, serta desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi radiasi matahari;
 - 6) Pengembangan PLTGL (Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut) dan PLTAL (Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut) diarahkan di Selat Lombok, Selat Alas, dan seluruh Kabupaten/ Kota berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah;
 - 7) Pengembangan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) diarahkan di Kabupaten Lombok Timur;
 - 8) Pengembangan PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya;
 - 9) Pengembangan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.
 - 10) Pengembangan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) diarahkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima;
 - 11) Pengembangan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima;
 - 12) Pengembangan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) diarahkan di Kabupaten Lombok Barat;
 - 13) Pengembangan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) diarahkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima; dan
 - 14) Pengembangan PLTGMU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap) diarahkan di Kota Mataram.

Selanjutnya dalam upaya pengembangan infrastruktur penyaluran listrik dan sarana pendukungnya, pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis, antara lain jaringan transmisi dan jaringan distribusi:

- 1) Jaringan transmisi meliputi:

- a) Pengembangan Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT) di setiap kabupaten/kota;
 - b) Pengembangan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) diarahkan di Kota Mataram; Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Pengembangan Gardu Induk (GI) diarahkan di seluruh kabupaten/kota; dan
 - d) jaringan transmisi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jaringan distribusi meliputi:
- a) jaringan kabel laut diarahkan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, dari Pulau Lombok ke Pulau-Pulau Kecil di sekitarnya, dan dari Pulau Sumbawa ke Pulau-Pulau Kecil di sekitarnya;
 - b) jaringan distribusi diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan serta kawasan-kawasan tertentu; dan
 - c) jaringan distribusi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi meliputi dua aspek yaitu jaringan telekomunikasi yang bersifat tetap dan jaringan telekomunikasi bergerak. Adapun program pengembangan jaringan telekomunikasi tetap, antara lain:

- 1) Pengembangan Saluran Telepon Otomat (STO) di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
- 2) Pengembangan jaringan serat optik yang teraplikasi dalam bentuk sistem telematika/internet di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima;
- 3) Pengembangan jaringan terestrial yang teraplikasi dalam bentuk gelombang radio yang dikembangkan berupa:
 - a) jaringan televisi lokal dengan jangkauan siaran ke seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - b) jaringan radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan program pengembangan untuk jaringan bergerak adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan jaringan mikro digital antar provinsi di seluruh Kabupaten/Kota;
- 2) Pengembangan jaringan satelit yang teraplikasi dalam bentuk jaringan internet dan jaringan selular yang diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota;
- 3) Pengembangan menara *Base Tranceiver Station* (BTS) untuk mendukung jaringan selular yang diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota dan pulau-pulau kecil;
 - BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
- 4) pengembangan jaringan telekomunikasi khusus, meliputi:
 - a) jaringan multimedia terpusat di Kota Mataram dengan distribusi Tanjung - Gerung - Praya - Selong - Taliwang - Sumbawa Besar - Dompu - Woha - Kota Bima;
 - b) pengembangan telekomunikasi untuk industrialisasi; dan
 - c) penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya yang penyebarannya berada di Ibukota Kecamatan.

D. Fasilitas Air Bersih

Pengembangan suatu daerah untuk menjadi sentra industri atau menjadi Kawasan industri tentu akan membutuhkan air bersih. Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum memiliki sumber air bersih dari sungai. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 2 (dua) Wilayah Sungai, yaitu Wilayah Sungai Pulau Lombok dan Wilayah Sungai Pulau Sumbawa. Adapun total Wilayah Sungai yang dimiliki adalah 197 di Pulau Lombok dan 555 di Pulau Sumbawa.

Selain sungai, fasilitas air bersih juga bersumber dari bendungan dan embung skala bendungan. Jumlah bendungan yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 70 bendungan dan tersebar merata di setiap kabupaten, kecuali Kabupaten Sumbawa Barat yang belum memiliki bendungan. Dengan potensi air bersih yang ada, pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan pelayanan sistem sumber daya air untuk mendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan, khususnya kegiatan industri.

Pemerintah ke depannya akan melakukan beberapa program strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, antara lain:

- 1) Pengembangan bendungan yang diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
- 2) Pengembangan 3000 (tiga ribu) hektar Daerah Irigasi Nasional yang melintasi kabupaten/kota diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
- 3) Pengembangan Daerah Irigasi Provinsi (1.000 – 3.000 hektar) tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima;
- 4) Pengembangan sumber mata air meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa;
- 5) Pengembangan jaringan suplesi irigasi diarahkan di Meninting-Sesaot (*west diversion*), Belimbing-Palung (*east diversion*), dan Kwangko-Waru.

E. Fasilitas Sanitasi

Pengelolaan fasilitas sanitasi khususnya dalam hal persampahan menjadi salah satu program unggulan provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah secara serius mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan pelayanan sistem pengelolaan persampahan ramah lingkungan. Dengan mengusung slogan NTB Zero Waste, pemerintah secara serius mengelola sampah agar mendatangkan keuntungan. Di sektor hulunya, pemerintah secara aktif melakukan campaign dan edukasi ke semua lapisan masyarakat agar menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan di sektor hilir, pemerintah terus mengembangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara optimal. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Selain TPA, pemerintah juga mendorong agar setiap TPA memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 10 (sepuluh) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota dan satu tambahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 4.1. Sebaran TPA dan TPST per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	NAMA TPA	KETERANGAN
1.	TPA Regional Kebun Kongok	TPA Regional Kebun Kongok yang berlokasi ke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat difungsikan untuk menampung sampah dari Kab. Lombok Barat dan Kota Mataram.
2.	TPA Jugil, Kab. Lombok Utara	TPA berada di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kab. Lombok Utara. Desain TPA adalah sanitary landfill, terdapat lapisan kedap air di dasar landfill, ada pengolahan lindi, ada pipa ventilasi gas, namun tidak terdapat jembatan timbang. Khusus untuk sampah di Gili Trawangan dikelola langsung di pulau. Sedangkan untuk Gili Air dan Gili Meno diangkut ke pelabuhan bangsal menggunakan 2 unit perahu.
3.	TPA Pengengat, Kab. Lombok Tengah	Saat ini Lombok Tengah menggunakan TPA Pengengat di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut yang memiliki luas mencapai 10 hektar dengan desain <i>sanitary landfill</i> namun operasional <i>controlled landfill</i> .
4.	TPA Ijo Balit, Kab. Lombok Timur	Saat ini Lombok Timur menggunakan TPA Ijo Balit, seluas 8.5 Hektar (area aktif 2 Hektar) dan sudah diperluas seluas 3.3 Hektar dengan desain <i>sanitary landfill</i> namun operasional <i>controlled landfill</i> .
5.	TPA Batu PutihKSB	TPA di Kabupaten Sumbawa Barat adalah TPA Batu Putih di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang seluas 5 Hektar dengan operasional <i>controlled landfill</i> .
6.	TPA Lekong, Kab. Sumbawa	Merupakan salah satu TPA yang operasional di Kabupaten Sumbawa, untuk melayani Kecamatan Alas Barat dan sekitarnya.
7.	TPA Raberas, Kab. Sumbawa	TPA Raberas berlokasi di Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Besar. TPA Raberas dibangun oleh Satker PSPLP Provinsi NTB dengan desain Sanitary Landfill.
8.	TPA Lune, Kab. Dompu	Saat ini Dompu menggunakan TPA Lune yang berlokasi di Desa Lune, Kecamatan Pajo, seluas 4,80 Hektar dengan operasional open dumping.
9.	TPA Waduwani, Kab. Bima	Kabupaten Bima menggunakan TPA Waduwani yang berlokasi di Desa Waduwani, Kecamatan Woha. Dengan luas 7,24 Ha, TPA Waduwani menampung sampah sebanyak 130,8 m ³ per hari dengan operasional <i>controlled landfill</i> .
10	TPA Oi Mbo, Kota Bima	TPA Oi Mbo berlokasi di Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. TPA ini beroperasi mulai tahun 2016. Dengan luas sekitar 10 Hektar, TPA Oi Mbo menerima sampah kurang lebih 300 m ³ per hari,

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, 2019

Gambar 4.1 Peta Sebaran TPA Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: Dinas LHK Provinsi NTB, 2019 (diolah LITBANG BAPPEDA NTB, 2019)

Dalam rangka mendukung program industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah melakukan beberapa program antara lain:

- 1) Program pemeliharaan TPA secara berkelanjutan dan mendorong agar terjadi pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan dan daur ulang) menjadi energi alternatif;
- 2) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Sampah, PLN, dan sektor lainnya untuk pengolahan sampah organik dan an-organik agar mampu memberikan nilai ekonomis keada masyarakat;
- 3) Program *campaign zero waste* kepada semua lapisan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastic sekali pakai (*single used*).

F. Fasilitas Jaringan Transportasi

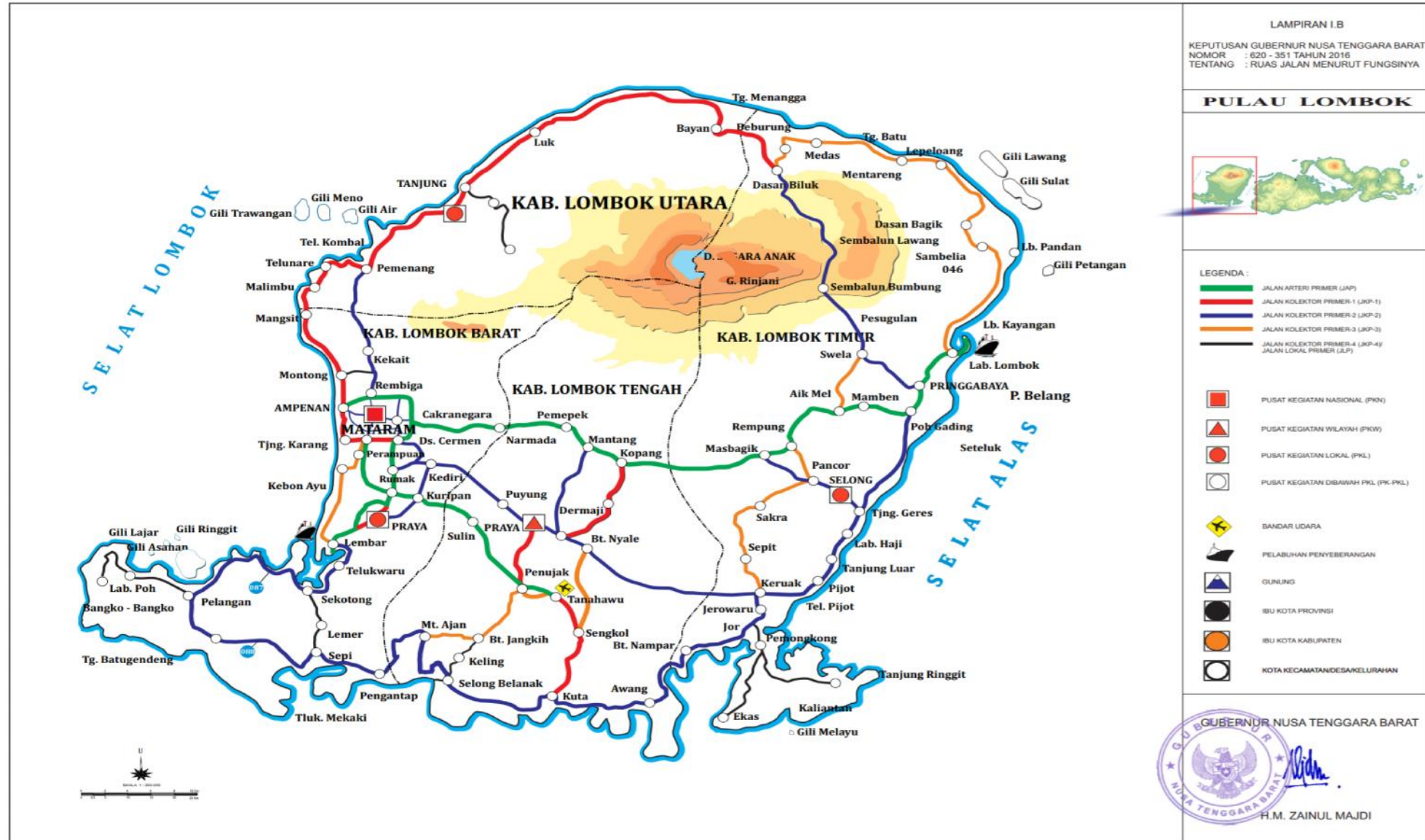
Jaringan transportasi menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan industri daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan orang. siklus perpindahan barang dan orang yang lancar dan berkesinambungan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya, dalam pengembangan fasilitas jaringan transportasi, pemerintah akan mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah yang terpadu untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, serta mengembangkan prasarana transportasi massal dan multi moda secara terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitarnya, antar pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pulau dan antar pusat pertumbuhan antara pulau.

Adapun moda transportasi yang umum digunakan di Nusa Tenggara Barat adalah transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

1) Transportasi Darat

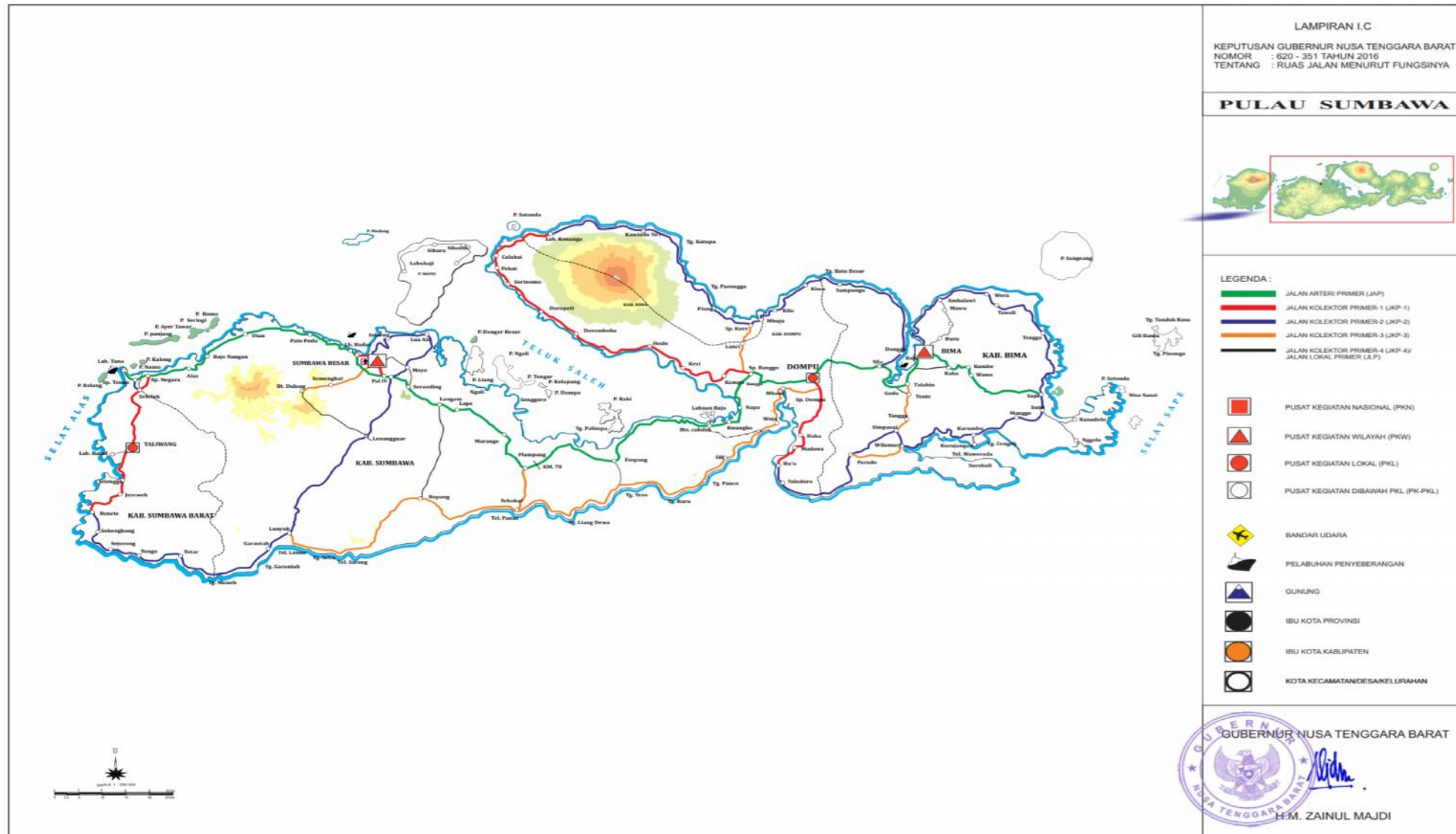
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 620-351 Tahun 2016 Tentang Status Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 81 Ruas Jalan negara dengan panjang total 934,55 Kilometer yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Gambar 4.2 Peta Ruas jalan Pulau Lombok, 2016



Sumber: Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016

Gambar 4.3 Peta Ruas jalan Pulau Sumbawa, 2016



Sumber: Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016

2) Transportasi Laut

Pelabuhan menjadi salah satu alternatif jalur transportasi yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan dimanfaatkan sebagai jaringan transportasi untuk mengangkut manusia dan barang. Hal ini mengindikasikan bahwa pelabuhan menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi daerah. Adapun sebaran jumlah pelabuhan di NTB cukup merata, hanya di Kabupaten Lombok Tengah yang tidak memiliki pelabuhan.

Tabel 4.2. Nama Pelabuhan Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Pelabuhan
1	Lombok Barat	Lembar
2	Lombok Tengah	-
3	Lombok Timur	Kayangan
4	Sumbawa	Badas dan Alas
5	Dompu	Kempo dan Calabai
6	Bima	Sape
7	Sumbawa Barat	Poto Tano dan Benete
8	Lombok Utara	Pemenang
9	Kota Mataram	Pelsus Pertamina
10	Kota Bima	Bima

Sumber: Badan Pusat Statistik NTB, 2019

Setiap pelabuhan yang ada akan dioptimalkan untuk menghubungkan aktivitas ekonomi daerah. Pelabuhan diharapkan akan menjadi penghubung antara satu daerah dengan daerah lainnya baik dalam hal jalur distribusi bahan baku maupun jalur pengiriman produk industri.

3) Transportasi Udara

Sama seperti pelabuhan yang memainkan peran dalam konektivitas antar daerah, bandar udara juga menjadi salah satu simpul moda transportasi dalam perpindahan barang dan orang. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 4 bandara. Dari keempat bandara tersebut, satu bandara yang terletak di Pulau Lombok yang berstatus internasional, artinya melayani penerbangan berangkat dan datang dari mancanegara. Adapun 3 bandara lainnya berada di Pulau Sumbawa dan baru melayani penerbangan domestik.

Tabel 4.3 Nama Bandara dan Lokasi

No	Nama Bandara	Lokasi
1	Lombok International Airport	Kab. Lombok Tengah
2	Sultan M. Khairuddin	Kab. Sumbawa
3	Sultan M. Salahudin	Kab. Bima

Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018

G. Sistem Informasi Industri

Pembangunan industri di Provinsi NTB mulai menarik perhatian khalayak ramai. Hal ini ditandai dengan kunjungan website Dinas Perindustrian NTB yang terus mengalami peningkatan, bahkan mencapai 7.000 kunjungan per harinya. Dari evaluasi bersama dengan Komisi Informasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depannya untuk memberikan informasi yang terbaru (*update*) tentang pengembangan industri di Provinsi NTB, antara lain:

- 1) Pengembangan *website* yang lebih menarik, atraktif dan informatif sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri;
- 2) Pengembangan aplikasi untuk pendataan perkembangan IKM NTB secara berkala sehingga masyarakat luas dapat mengakses infonya lebih terbaru (*update*);
- 3) Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu;
- 4) Melakukan pengumuman, pelayanan, serta penyediaan informasi data secara komprehensif dan dilakukan secara berkala;

V. PERWILAYAHAN INDUSTRI

A. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi

A.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi NTB ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi:

1. KSN dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
2. KSN dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penetapan tersebut, maka KSN di wilayah Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5. 1 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi NTB

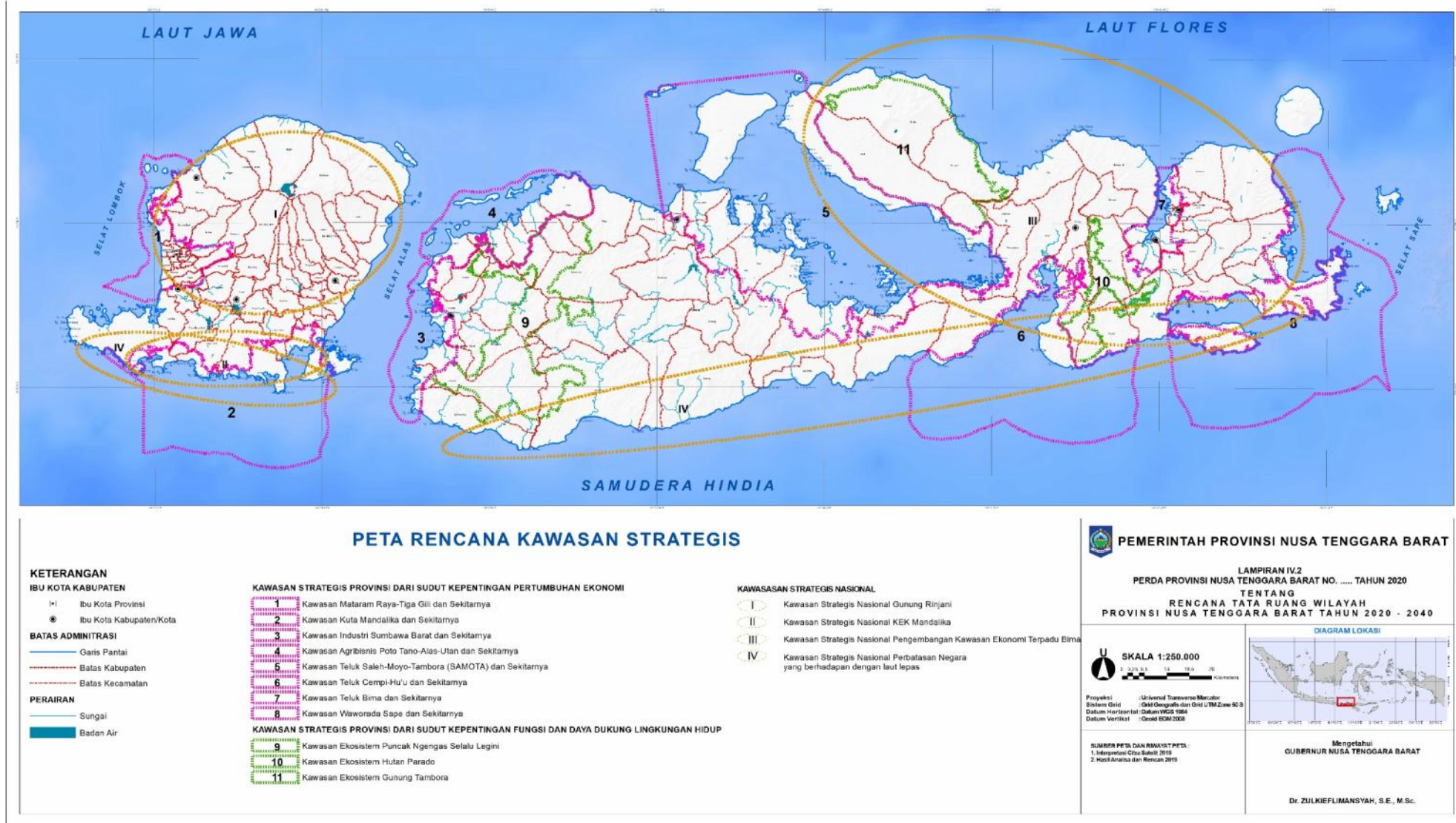
No	Kepentingan	Kriteria	K S N	Tema Penanganan
1.	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional Memiliki potensi ekspor 	Pengembangan Kawasan Bima	Pengembangan/Peningkatan
2.	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional 	KEK Mandalika	Pengembangan/Peningkatan
3.	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional 	Kawasan Komodo	Pengembangan/Peningkatan
4.	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Tempat perlindungan keanekaragaman hayati Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro Rawan bencana alam nasional Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan 	Gunung Rinjani	Rehabilitasi/revitalisasi kawasan
5.	Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas 	Perbatasan Negara yang berhadapan dengan laut lepas (Pulau Sepatang)	Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

Sumber: PP 13/2017 tentang Perubahan Atas PP 26/2008 tentang RTRW Nasional

A.2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Gambar 5.1 Peta Rencana Kawasan Strategis



Tabel 5.2 Kawasan Strategis Provinsi Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

NO	KSP	CAKUPAN WILAYAH	SEKTOR UNGGULAN	BENTUK PENANGANA N
1.	Kawasan Mataram Raya-Tiga Gili dan Sekitarnya	<p>Kota Mataram</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Mataram - Kecamatan Ampenan - Kecamatan Cakranegara - Kecamatan Selaparang - Kecamatan Sekarbela - Kecamatan Sandubaya <p>Kabupaten Lombok Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Batulayar - Kecamatan Gunungsari - Kecamatan Lingsar - Kecamatan Narmada - Kecamatan Labuapi - Kecamatan Kediri - Kecamatan Kuripan - Kecamatan Gerung <p>Kabupaten Lombok Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Pemenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan dan jasa - Industri - Pariwisata - Perikanan 	Penataan kawasan
2.	Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya	<p>Kabupaten Lombok Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sekotong <p>Kabupaten Lombok Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Praya Barat - Kecamatan Pujut - Kecamatan Praya Barat Daya - Kecamatan Praya Timur <p>Kabupaten Lombok Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Perikanan - Industri 	Akselerasi sektor-sektor unggulan

NO	KSP	CAKUPAN WILAYAH	SEKTOR UNGGULAN	BENTUK PENANGANAN
		Jerowaru		
3.	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya	Kabupaten Sumbawa Barat <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Taliwang - Kecamatan Poto Tano - Kecamatan Maluk - Kecamatan Jereweh - Kecamatan Sekongkang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan dan Industri Turunannya - Perikanan - Pariwisata 	Akselerasi sektor-sektor unggulan
4.	Kawasan Agribisnis Poto Tano-Alas-Utan dan Sekitarnya	Kabupaten Sumbawa Barat <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Brang Rea - Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Alas - Kecamatan Alas Barat - Kecamatan Utan - Kecamatan Buer 	<ul style="list-style-type: none"> - Agroindustri - Perikanan - Peternakan - Pariwisata 	Pengembangan/ peningkatan dan konservasi kawasan
5.	Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya	Kabupaten Sumbawa <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sumbawa - Kecamatan Labuhan Badas - Kecamatan Labuan Aji - Kecamatan Moyo Hilir - Kecamatan Moyo Hulu - Kecamatan Moyo Utara - Kecamatan Plampang - Kecamatan Lape - Kecamatan Lopok - Kecamatan Maronge - Kecamatan Empang - Kecamatan Tarano Kabupaten Dompu	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pariwisata - Pertanian - Peternakan - Industri (Minaindustri, Agroindustri, Energi) 	Akselerasi sektor-sektor unggulan beserta wilayah perairannya

NO	KSP	CAKUPAN WILAYAH	SEKTOR UNGGULAN	BENTUK PENANGANAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Manggelewa - Kecamatan Kempo - Kecamatan Pekat 		
6.	Kawasan Teluk Cempihu'u dan Sekitarnya	Kabupaten Sumbawa <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Tarano Kabupaten Dompu <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Pajo - Kecamatan Dompu - Kecamatan Hu'u - Kecamatan Woja Kabupaten Bima <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Monta - Kecamatan Parado 	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Perikanan - Industri - Pertambangan dan Energi 	Pengembangan/ peningkatan dan konservasi kawasan
7.	Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya	Kota Bima <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Mpunda - Kecamatan Rasanae Barat - Kecamatan Asakota - Kecamatan Bima - Kecamatan Soromandi - Kecamatan Bolo - Kecamatan Palibelo - Kecamatan Woha 	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Perikanan - Perdagangan dan Jasa 	Pengembangan/ peningkatan dan konservasi kawasan
8.	Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya	Kabupaten Bima <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Langgudu - Kecamatan Monta - Kecamatan Lambu - Kecamatan Sape - Kecamatan Wera 	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pariwisata - Industri 	Pengembangan/ peningkatan sektor unggulan

B. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukan Industri secara umum terdiri dari zona inti dan zona penyangga.

Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi NTB memiliki luas 8.852 Ha. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi NTB adalah:

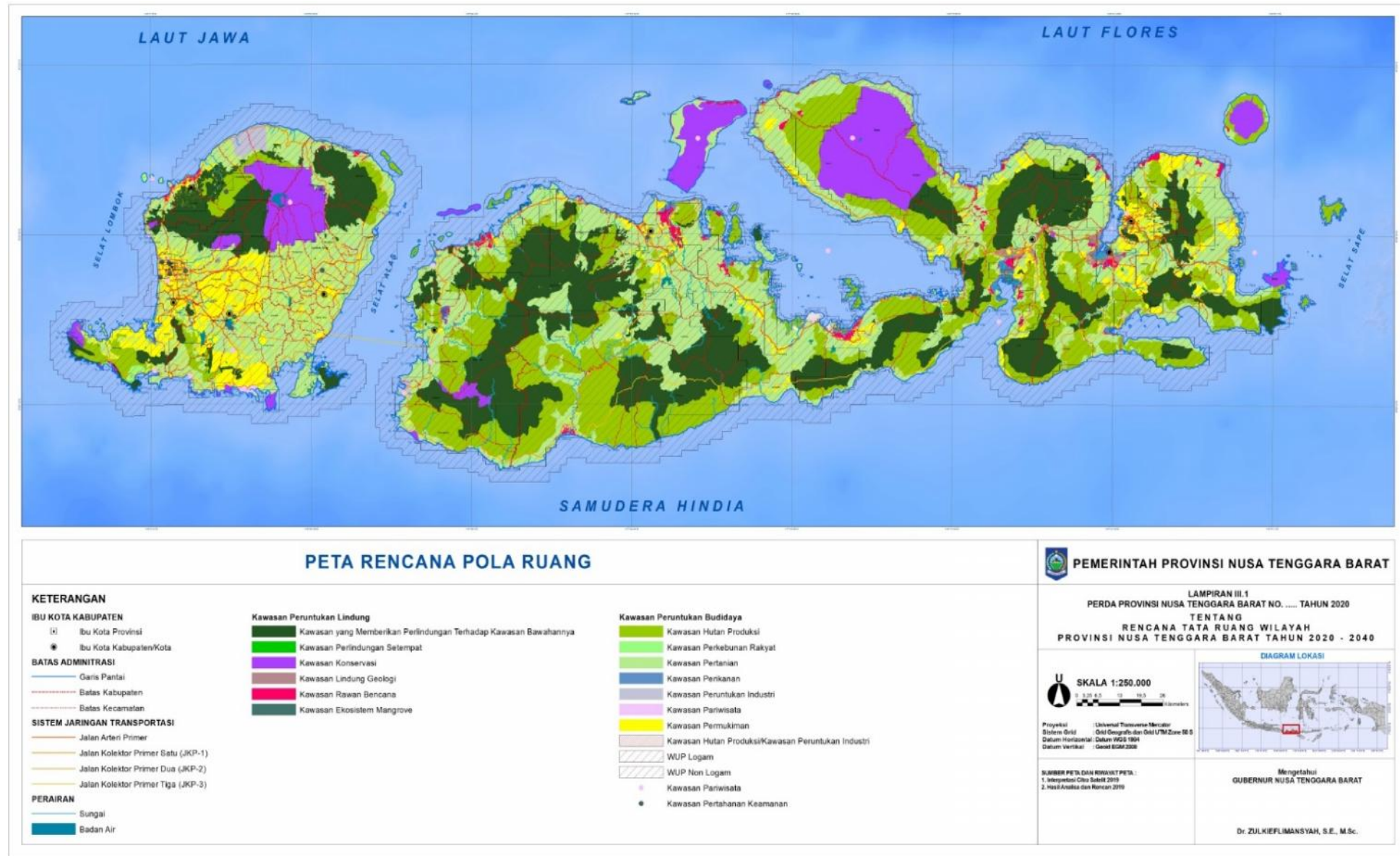
1. Kawasan Peruntukan Industri Besar

REKOMENDASI DARI KLHS

Arahan Lokasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Besar

1. *Pengembangan Kawasan Industri Gili Mas di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;*
2. *Pengembangan Kawasan Industri Baru Global Hub Internasional di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;*
3. *Pengembangan Kawasan Industri Tebu di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;*
4. *Pengembangan Kawasan Industri dan Pengolahan Hasil Tambang (Smelter) Maluk – Benete di Kecamatan Maluk dan sekitarnya, Kabupaten Sumbawa Barat*
5. *Industri pengolahan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Sumbawa Besar, dan Kecamatan Manggelewa*

Gambar 5.2 Peta Rencana Pola Ruang



2. Peruntukan agroindustri dikembangkan di:

- a) Kabupaten Lombok Barat (Kediri, Labuapi, Sekotong);
- b) Kabupaten Lombok Utara (Bayan, Kayangan, Gangga);
- c) Kabupaten Lombok Tengah (Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut);
- d) Kabupaten Lombok Timur (Wanasaba, Aikmel, Sembalun, Labuhan Haji);
- e) Kabupaten Sumbawa Barat (Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea);
- f) Kabupaten Sumbawa (Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang);
- g) Kabupaten Dompu (Dompu, Kempo);
- h) Kabupaten Bima (Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape);
- i) Kota Bima (RasanaE)

3. Zona/lokasi industri (industri kecil dan menengah) kembangkan di seluruh Kabupaten/Kota dengan potensinya masing-masing.

Adapun strategi arahan pemanfaatan ruang untuk program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagai berikut:

Tabel 5.3 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No	Program pengembangan	2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	<p>Memprioritaskan pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, berteknologi tinggi dan tepat guna, padat karya, dan didukung pengelolaan limbah industri terpadu melalui penerapan <i>clean development mechanism</i> pada:</p> <p>a) Industri pengolahan dan jasa hasil peternakan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan;</p> <p>b) Industri pengolahan dan jasa hasil perikanan dan kelautan; dan</p> <p>c) Industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi.</p>	√	√	√
2	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;	√	√	√
3	Mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri kreatif sesuai potensi dan keunikan lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan;	√	√	√
4	Mengembangkan metode daur ulang air pada	√	√	√

No	Program pengembangan	2020-2024	2025-2029	2030-2040
	kawasan peruntukan industri menjadi air baku;			
5	Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana longsor, banjir, gelombang pasang, gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, abrasi;	√	√	√
6	Membatasi pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan peruntukan industri; dan	√	√	√
7	Pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; b) Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah; c) Memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan; d) Industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.	√	√	√

C. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri (KI) merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Adapun Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya memiliki 1 (satu) Kawasan Industri, yaitu Kawasan Industri Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki luas 1300,9 Ha. Kawasan Industri dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Tabel 5.4 Program Pengembangan Kawasan Industri

No	Program pengembangan	2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Penyusunan rencana pembangunan kawasan Industri;	√	√	
2	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri;	√	√	
3	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;	√	√	√
4	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri;	√	√	√

No	Program pengembangan	2020-2024	2025-2029	2030-2040
5	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung Kawasan industri;	√	√	√
6	Pembangunan kawasan industri			√
7	Pengoperasian bank tanah (land bank) untuk pembangunan kawasan industri			√
8	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri;	√	√	√
9	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri	√	√	√
10	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM	√	√	√
11	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN)	√	√	√
12	Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung)	√	√	√

Sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tentang proses persiapan pembangunan smelter. PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga diamanatkan untuk membangun smelter (pemurnian konsentrat). Dengan adanya pembangunan smelter, maka akan muncul potensi industri turunan smelter seperti industri semen, pupuk, dan industri lainnya. Adapun strategi dalam mengembangkan industri turunan smelter, sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian dan pemetaan terkait penyusunan *master plan* dan *siteplan* untuk pembangunan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b) Mengedepankan Kerjasama dan sinergi antara semua stakeholders terkait dalam upaya mendukung pengembangan industri smelter dan turunannya;
- c) Penguatan peran Sumber Daya Manusia lokal dalam upaya mengisi kebutuhan tenaga kerja;
- d) Melakukan pemetaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang industri turunan smelter;
- e) meningkatkan penelitian dan pengembangan potensi industri pabrik semen, pabrik pupuk, pabrik kabel, dan potensi lainnya sebagai industri turunan smelter;
- f) Terciptanya iklim investasi yang ramah investor untuk akselerasi industri turunan smelter;

- g) terbangunnya dukungan infrastruktur yang memadai dalam upaya mewujudkan industri turunan smelter; dan
- h) Adanya fasilitasi pemberian insentif bagi investor di bidang industri turunan smelter.

D. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan satu kelompok IKM yang menggunakan bahan baku sejenis, melakukan proses produksi yang sama, dan/atau menghasilkan produk yang sejenis yang berada pada satu lokasi/tempat. Membuat sentra IKM akan mempermudah intervensi berupa pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan IKM tersebut. Adapun kondisi saat ini, ada IKM mulai tumbuh dan berkembang, namun dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang diberikan kurang efektif dan membutuhkan biaya besar, atau ada IKM yang sudah berbentuk sentra namun belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan IKM secara efektif dan efisien.

Secara lebih detail, pengembangansentra IKM dapat dilakukan melalui beberapa intervensi, antara lain:

Tabel 5.5 Program Pengembangan Sentra IKM

No	Program pengembangan	2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Pemetaan dan pematangan lokasi sentra IKM di setiap kabupaten / kota sesuai dengan Industri Prioritas daerah tersebut;	√		
2	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota;	√	√	
3	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjadi pengelola dan penanggung jawab sentra IKM;	√	√	√
4	Pengembangan dan pembinaan sentra IKM;	√	√	√
5	Pengintegrasian jalur distribusi bahan baku, bahan penolong, proses produksi hingga distribusi produk;	√	√	√
6	Pembangunan infrastruktur pendukung di area sentra seperti Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan pembangunan sarana penunjang seperti Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan yang diperlukan di dalam sentra;	√	√	
7	Pengembangan kemampuan dan kapasitas peralatan/mesin dalam proses produksi agar IKM mampu menghasilkan produk yang terstandar dan sesuai dengan kebutuhan pasar;	√	√	
8	Penyiapan Pusat Promosi dan Ruang Pameran produk IKM untuk sentra IKM yang sudah	√	√	√

	memiliki produk terstandarisasi baik untuk pasar nasional maupun pasar global.			
--	--	--	--	--

VI. KEBIJAKAN AFIRMATIF INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Peran Industri Kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian. Industri Kecil dan Menengah memiliki produk beragam yang sangat banyak, yang tersebar di wilayah pasar yang luas. Sehingga hal ini menjadikan sumber pendapatan bagi masyarakat luas. Berkembangnya IKM akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di daerah maupun nasional. Untuk itu diharapkan Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah.

A. Sasaran Pengembangan IKM

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel 6.1 Sasaran Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

No	Sasaran
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN
1	Penguatan dan pengembangan Sentra IKM
2	Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
3	Penyediaan tenaga penyuluh lapangan
4	Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah
II	PEMBERIAN FASILITAS
1	Peningkatan kompetensi SDM
2	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis
3	Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong
4	Pemberian bantuan mesin atau peralatan

No	Sasaran
5	Pengembangan produk
6	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
7	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran
8	Fasilitasi akses pembiayaan
9	Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan)
10	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar
11	Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM
12	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM
13	Fasilitasi legalitas usaha
14	Fasilitasi Kemasan Bagi Produk Pangan
15	Fasilitasi Pendaftaran Merk
16	Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM

B. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IKM

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

1. dalam rangka keberpihakan terhadap IKM di daerah ditetapkan perda yang mengatur bela, beli dan pakai produk IKM Lokal.
2. dalam rangka keberpihakan terhadap IKM di daerah ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;
3. pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM;
4. dalam rangka penguatan struktur industri, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
5. dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

C. STRATEGI PENGEMBANGAN IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri daerah, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1. Pemanfaatan Potensi Bahan Baku

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber bahan baku yang sangat potensial. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikutidengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3. Pemanfaatan Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, permodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya. Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama.

4. Meningkatkan Daya Saing Produk Melalui Penerapan Standarisasi

Penerapan standarisasi baik pada bahan baku, proses produksi, maupun pada sarana prasarana IKM akan meningkatkan daya saing dari produk.

5. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Dibidang Industri Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja dibidang industri yang terlatih akan membantu meningkatkan produktifitas dari IKM, peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan.

D. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

1. meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
2. mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, *procurement* dan pemasaran bersama;
3. perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
4. diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
5. peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM, UPT, TPL, dan konsultan IKM;
6. kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
7. Menggali potensi sumber daya industri (bahan baku, teknologi, inovasi dan pembiayaan) yang dibutuhkan oleh industri di Nusa Tenggara Barat
8. mendorong penggunaan produk IKM lokal di masyarakat dan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
9. kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi; dan
10. pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;

- c. bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
- d. pengembangan produk;
- e. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
- f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- g. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan;
- h. pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan;
- i. Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM;
- j. Pendampingan penerapan standarisasi pada IKM; dan
- k. Peningkatan kemampuan IKM dalam pemanfaatan dan pengelolaan limbah.